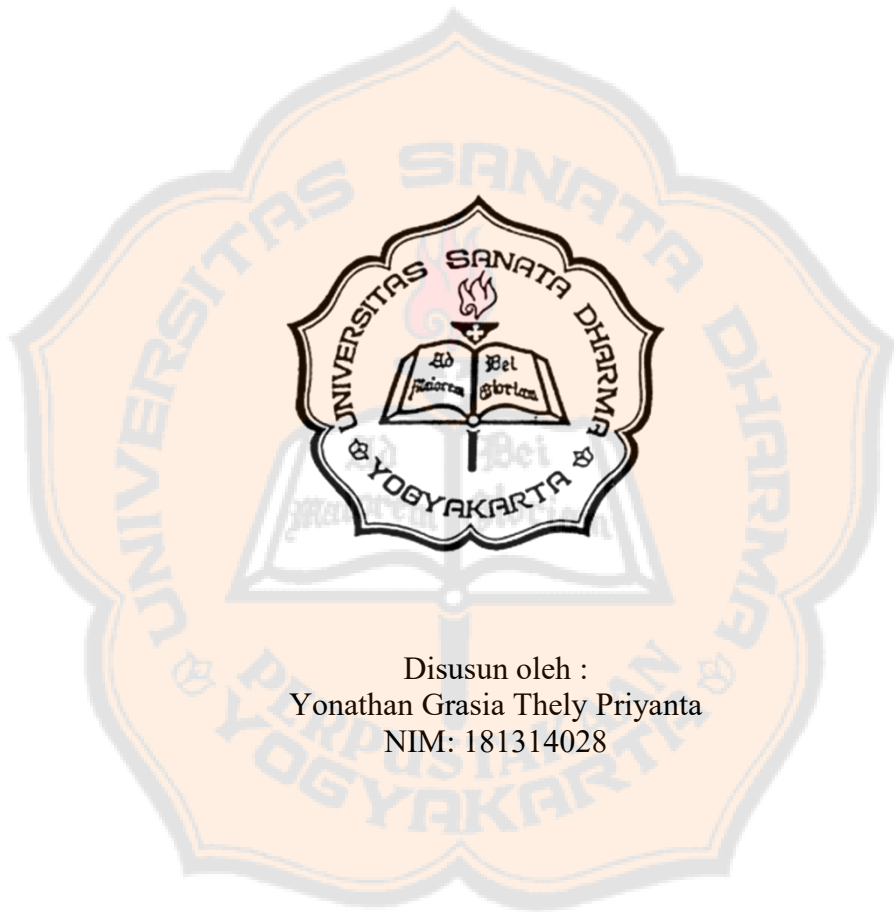


**TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL - POLITIK
INDONESIA TAHUN 1999-2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Disusun oleh :
Yonathan Grasia Thely Priyanta
NIM: 181314028

**FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2023

SKRIPSI

TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL - POLITIK
INDONESIA TAHUN 1999-2000

Disusun oleh :
Yonathan Grasia Thely Priyanta
NIM: 181314028

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I,



Dr. Anton Haryono, M. Hum

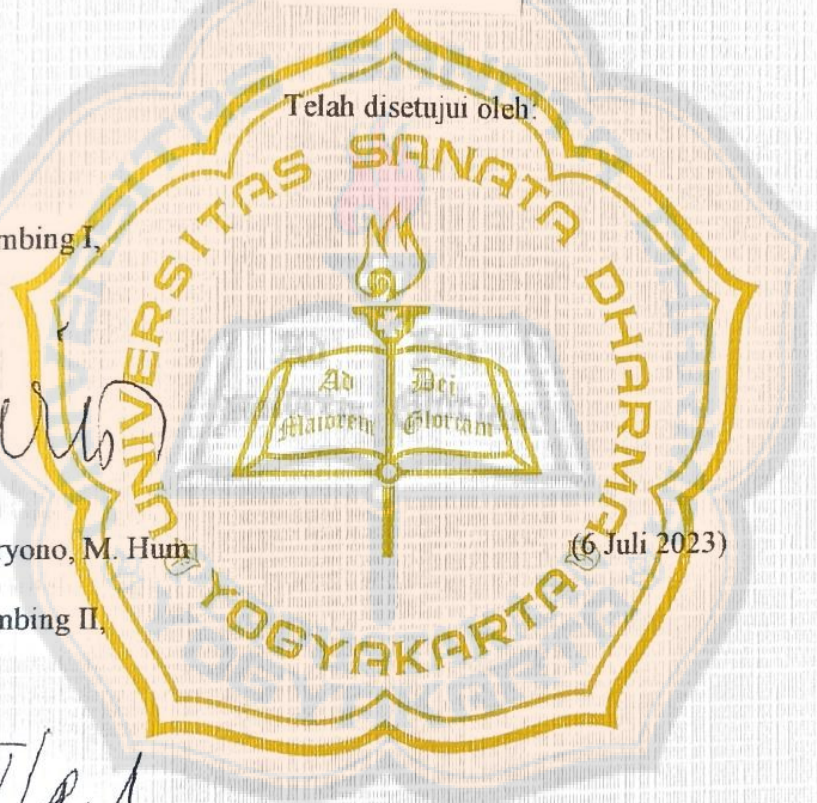
(6 Juli 2023)

Dosen Pembimbing II,



Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.


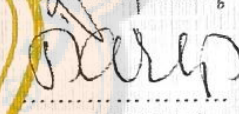
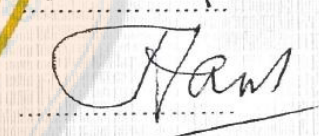
(6 Juli 2023)



SKRIPSI
TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL - POLITIK
INDONESIA TAHUN 1999-2000

Dipersiapkan dan disusun oleh :
Yonathan Grasia Thely Priyanta
NIM: 181314028

Susunan Dewan Penguji :

JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
Ketua	: Florentinus Suryanto Hadi, S.J. S.S., M.Hum., Lic.Hist.E	
Sekretaris	: Dr. Anton Haryono, M. Hum	
Anggota	: Drs. A. Kardiyat Winaryanto, M. M	

Yogyakarta, 13 Juli 2023
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. Parsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

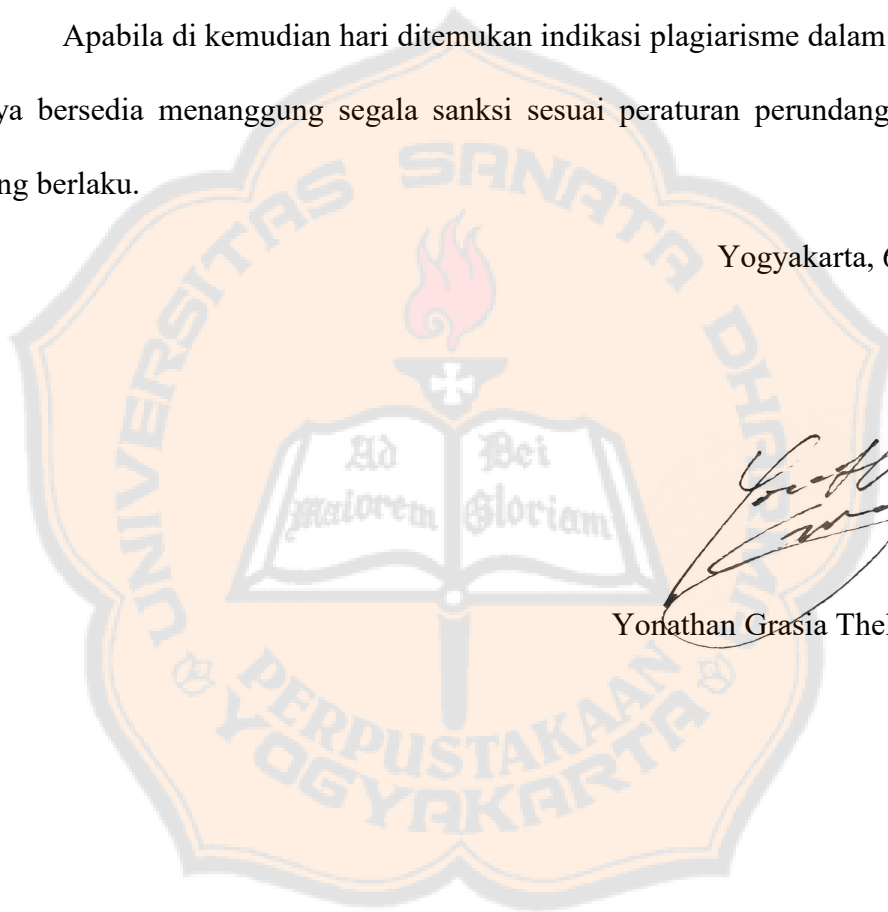
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka dengan mengikuti ketentuan sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiarisme dalam naskah ini, saya bersedia menanggung segala sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Juli 2023

Penulis,


Yonathan Grasia Thely Priyanta



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Yonathan Grasia Thely Priyanta
NIM : 181314028

Demi perkembangna ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL - POLITIK
INDONESIA TAHUN 1999-2000**

Dengan demikian saya memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma baik untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolah dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya atau memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Yogyakarta,
6 Juli 2023
Yang menyatakan,



Yonathan Grasia Thely Priyanta

MOTTO

Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamanunya Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini Tuhan menolong kita.”

1 Samuel 7 : 12



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada saya hingga saya mampu menyelesaikan pengerjaan skripsi dengan judul “Taring Padi dalam Dinamika Sosial-Politik Indonesia 1999-2000”. Saya juga menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

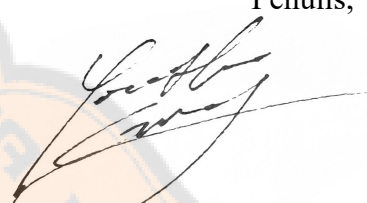
1. Drs. Tarsius Sarkim, M.Ed.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial Universitas Santa Dharma Yogyakarta.
3. Brigida Intan Printina, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Dr. Anton Haryono, M. Hum., dan Drs. A. K. Wiharyanto, M. M., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberikan semangat dan senantiasa memberikan arahan kepada saya.
5. Seluruh Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibuk, beserta kakak saya, yang memberikan bantuan moral maupun finansial dalam pengerjaan tugas akhir saya.

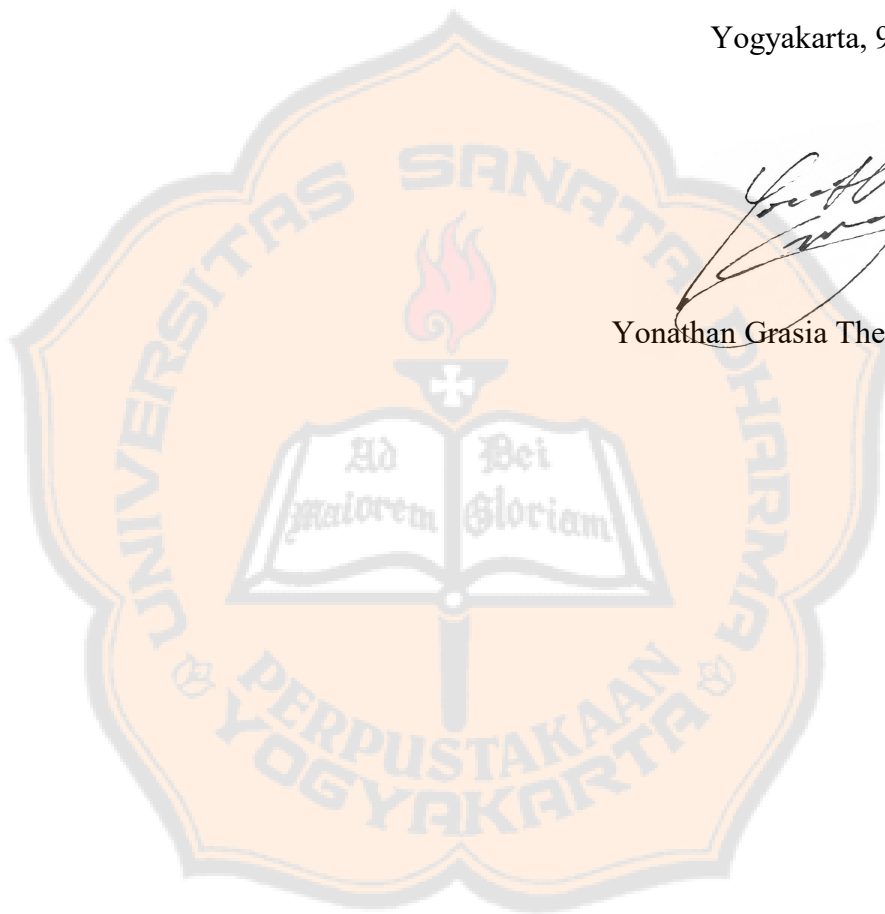
7. Teman-teman Pendidikan Sejarah 2018, terutama teman sepermainan dan rekan Historis yang membantu dalam diskusi dan melepas penat.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 9 Juni 2023

Penulis,


Yonathan Grasia Thely Priyanta



ABSTRAK

**TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL - POLITIK
INDONESIA TAHUN 1999-2000**

Yonathan Grasia Thely Priyanta

181314028

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Keadaan politik Indonesia pada tahun 1998, 2) Keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000, 3) Dampak keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000.

Penelitian ini menggunakan metode *historis* yang dimulai melalui pemilihan topik, pengumpulan sumber, pemilihan sumber, penafsiran sumber dan penulisan sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sosial politik yang kemudian akan disajikan secara deskriptif. Dalam menuliskan hasil penelitian, penulis juga melakukan observasi untuk menambah keberagaman serta keakuratan hasil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dinamika sosial-politik di Indonesia pada tahun 1998-2000 telah melahirkan beberapa gerakan sosial berbasis kerakyatan, salah satunya adalah Taring Padi. 2) Kemunculan Taring Padi dalam panggung sosial merupakan respon dan komitmen kelompok terhadap nilai kerakyatan yang diikat dengan sosio-emosional. Dalam melakukan kerja aktivisme dan advokasi, Taring Padi menggunakan pendekatan artistik sebagai bentuk pendekatan alternatif kelompok kepada *audience* yang lebih besar. 3) Dampak yang diberikan oleh Taring Padi memang tidak terlihat secara eksplisit, tetapi Taring Padi dalam dinamika sosial-politik pasca reformasi memberikan beberapa cara alternatif untuk masyarakat atau organisasi serupa untuk tetap hidup dan melanjutkan idealisme mereka. Kerja aktivisme yang dibungkus dengan pendekatan seni memberikan opsi lain bagi masyarakat untuk secara aktif mengungkapkan suara mereka mengenai penindasan. Transformasi merupakan tujuan akhir Taring Padi, masyarakat mendapatkan kembali posisinya dalam dinamika politik Indonesia.

Kata Kunci: Taring Padi, Gerakan Sosial Baru, Krisis Moneter, Reformasi, Budaya Kerakyatan

ABSTRACT

**TARING PADI IN SOCIAL-POLITIC DYNAMICS
INDONESIA 1999-2000**

Yonathan Grasia Thely Priyanta

181314028

This study aims to describe: 1) the Indonesian political situation in 1998, 2) Taring Padi's involvement in Indonesian socio-political dynamics in 1999-2000, and 3) the Impact of Taring Padi's involvement in Indonesian socio-political dynamics in 1999-2000.

This research uses the method historical which begins with selecting topics, collecting sources, selecting sources, interpreting sources, and writing history. The approach used in this thesis is socio-political which will then be presented descriptively. In writing the research results, the authors also make observations to increase the diversity and accuracy of the results.

The results of this study indicate that: 1) The socio-political dynamics in Indonesia in 1998-2000 gave birth to several social movements based on democracy, one of which was Taring Padi. 2) The emergence of Taring Padi on the social stage is a group's response and commitment to social values bound by socio-emotional elements. In carrying out activism and advocacy work, Taring Padi uses an artistic approach as an alternative form of a group approach to the audience the greater one. 3) the impact given by Taring Padi is not explicitly seen. Still, Taring Padi in the post-reform socio-political dynamics provides several alternative ways for communities or similar organizations to survive and continue their idealism. Activism wrapped in an artistic approach provides another option for people to express their voices about oppression actively. Transformation is Taring Padi's ultimate goal, society regains its position in the dynamics of Indonesian politics.

Keywords: *Taring Padi, New Social Movements, Monetary Crisis, Reform, Populist Culture*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	IV
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK	IX
<i>ABSTRACT</i>	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4. Tinjauan Pustaka	4
1.5. Landasan Teori	6
1.6. Metode dan Metodologi Penelitian	14
1.7. Sistematika Penulisan	20

BAB II. KEADAAN POLITIK INDONESIA 1998	22
2.1. Politik Orde Baru	22
2.2. Pecahnya Rusuh 1998	27
2.3. Angin Segar Revormasi	35
BAB III. KETERLIBATAN TARING PADI DALAM DINAMIKA SOSIAL	
POLITIK 1999-2000	39
3.1. Haluan Kerja Taring Padi	39
3.2. Kerja Seni Taring Padi	44
BAB IV. DAMPAK KETERLIBATAN TARING PADI DALAM SOSIAL	
POLITIK INDONESIA TAHUN 1999-2000	64
4.1. Politik	64
4.2. Sosial	72
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses produksi poster Taring Padi	45
Gambar 2. Wayang kardus anti militerisme	49
Gambar 3. Seri poster humanisme Taring Padi	53
Gambar 4. Banner “38 kursi gratis”	56
Gambar 5. Banner “38 kursi gratis”	56
Gambar 6. Banner “Sidang Rakyat”	56
Gambar 7. Banner “Pengungsi #1”	58
Gambar 8. Banner “Karnaval Anti Militerisme”	59
Gambar 9. Terompet Rakyat, Februari 1999	60
Gambar 10. Terompet Rakyat, Februari 1999	60
Gambar 11. Terompet Rakyat, Februari 1999	61
Gambar 12. Terompet Rakyat, April 1999	61
Gambar 13. Terompet Rakyat, Mei 1999	62
Gambar 14. Terompet Rakyat, Mei 1999	62
Gambar 15. Terompet Rakyat, Mei 1999	63
Gambar 16. Terompet Rakyat, Juni 1999	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan seni sebagai medium ekspresi telah menunjukkan sifat liarnya dalam memilah-milah subyeknya. Eksplorasi sikap yang disuguhkan oleh seni merupakan reaksi terhadap kondisi lingkungan. Pemanfaatan seni sebagai medium ekspresi telah mengalami perkembangan pesat sejak awal abad ke-20. Seni tidak lagi dikotakkan dalam medium artistik, melainkan didorong semakin jauh kedalam ranah lingkungan sosial, digunakan sebagai cermin reflektif dalam melihat kondisi sosial suatu masyarakat. Seni yang demikian hadir sebagai pisau bedah dalam melihat dinamika sosial aktual.

Kelompok Dada menjadi salah satu pionir dalam pemanfaatan seni dengan sudut pandang atau pendekatan reflektif aktual. Hadir pada periode Perang Dunia Pertama (PD I), kelompok Dada merasakan adanya urgensi yang lebih penting ketimbang pembahasan supremasi militer. Beranggotakan seniman dan pemikir, kelompok Dada menyampaikan sudut pandang mereka terhadap lingkungan sosial melalui seni. Dilandaskan pada perasaan jenuh terhadap degradasi moral pemimpin, kelompok ini secara lugas mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap kondisi sosial mereka melalui medium seni¹.

Jauh setelah munculnya kelompok Dada pada tahun 1919, yang fokus memanfaatkan seni sebagai medium ekspresi lingkungan sosial, pada tahun 1998, seiring dengan terjadinya gejolak sosial-ekonomi-politik, di Indonesia muncul kelompok seni progresif senada dengan Dada yang menamai diri mereka Taring

¹ <https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/13/behold-the-buffoon-dada-nietzsche-ecce-homo-and-the-sublime> diakses pada 16 Juli 2023, pukul 15.39 WIB.

Padi. Bila kelompok Dada jengah terhadap kondisi sosial-politik Eropa pada periode PD I, maka Taring Padi tidak puas dan lelah terhadap kontrol keras pemerintah Orde Baru. Sama seperti kelompok Dada, Taring Padi menyuarakan pikiran atau aspirasi mereka dengan menggunakan medium seni. Taring Padi berusaha melakukan transfer pemikiran dan pemaparan realitas berdasarkan apa yang mereka temukan selama terlibat langsung dalam demonstrasi 1998.

Taring Padi merupakan kelompok seniman yang tanggap zaman. Selaku seniman, mereka juga berusaha mengaktualisasikan diri sebagai agen perubahan. Taring Padi hadir di tengah-tengah masyarakat melalui praktik seni yang sarat dengan muatan aktivisme sosial. Melalui medium seni, mereka berusaha mengungkap permasalahan yang dihadapi masyarakat akar rumput dengan suara yang lebih keras dan tegas. Bagi Taring Padi transfer informasi permasalahan aktual masyarakat akar rumput melalui pendekatan artistik merupakan kewajiban atau tanggung jawab kelompok. Target informasi yang diharapkan adalah masyarakat yang lebih luas dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran terhadap kondisi sebenarnya dari lingkungan sosial-politik mereka.

Pendekatan artistik dalam menyuarakan permasalahan sosial dipilih oleh kelompok Taring Padi sebagai jalan keluar alternatif. Pemilihan tersebut didasarkan kepada kekuatan atau daya tarik yang dimiliki oleh medium seni¹. Tujuannya adalah untuk menarik masa sebanyak mungkin dan menciptakan kesadaran bahwa keadaan politik-sosial yang tampak baik-baik saja ternyata masih membawa pekerjaan rumah bagi masyarakat akar rumput (kelompok marginal). Usaha reflektif inilah yang kemudian dikembangkan Taring Padi

¹ Sugiharto Bambang. "Untuk Apa Seni?". Matahari. Bandung. 2013. h. 31

sebagai bagian dalam kerja artistik dan aktivisme sosial mereka. Melalui pendekatan ini, Taring Padi berharap dapat membedah fenomena sosial-politik dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat luas.

Penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena sosial-politik yang diterjemahkan secara kreatif ke dalam ranah seni oleh kelompok Taring Padi. Keterlibatan dan keberpihakan mereka kepada rakyat kecil menarik untuk dibahas, seni bisa menjadi medium edukasi dan kritik sosial yang handal. Penelitian ini juga akan membahas peran seni dalam dinamika sosial kelas bawah dan perkembangan dunia seni kerakyatan setelahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat tiga permasalahan yang hendak dibahas :

1. Bagaimana keadaan politik Indonesia pada tahun 1998?
2. Bagaimana keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000?
3. Bagaimana dampak keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai permasalahan yang hendak dibahas, skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan keadaan politik Indonesia pada tahun 1998.
2. Mendeskripsikan keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000.
3. Menganalisis dampak keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia tahun 1999-2000.

Adapun, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi satu sumbangan ilmu pengetahuan, terlebih bagi ilmu sosial dan seni.

2. Bagi Prodi Pendidikan Sejarah

Penelitian ini bisa memberikan sudut pandang baru dalam pembahasan mengenai dinamika sosial-politik yang terjadi di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga bisa mendorong generasi selanjutnya untuk berani mengambil pokok bahasan baru yang lebih unik dan eksploratif.

3. Bagi Peneliti

Skripsi ini diharapkan menjadi bentuk verifikasi pemikiran peneliti yang sudah dituangkan dalam bentuk karya tulis .

4. Bagi Masyarakat

Skripsi ini menjadi rujukan, terlebih untuk penulisan yang mengedepankan masalah dinamika sosial-politik yang melibatkan kelompok Taring Padi sebagai variabel dalam penelitiannya.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam proses pencarian sumber tertulis, terdapat beberapa penelitian, yang mengambil Taring Padi sebagai fokus bahasan. Buku bertajuk "*Taring Padi - Seni Membongkar Tirani*" karangan Dolorosa Sinaga, dkk menjadi salah satu sumber penelitian. Buku ini merangkum beberapa tokoh yang terlibat langsung maupun tak langsung dengan kegiatan Taring Padi pada tahun 1998. Dolorosa Sinaga, dkk membahas mengenai ideologi, gerakan kesenian dan sosial, serta beberapa ciri

karya Taring Padi. Secara garis besar, buku ini membahas mengenai praktik seni Taring Padi yang berfokus pada konteks perlawanan terhadap pemerintah dan tuntutan anti anarki dari polisi maupun TNI. Selain perkara ideologi kelompok dan praktik kerja seni, juga kental pokok bahasan tentang kondisi sosial-politik yang kemudian diejawantahkan ke dalam praktik kerja seni Taring Padi.

Buku selanjutnya berjudul “Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia” oleh Benedict Anderson (terjemahan Revianto Budi Santosa). Pendekatan budaya menjadi satu tema besar dan salah satu sub temanya berfokus pada pembahasan mengenai budaya politik Suharto. Budaya politik era Orde Baru dijelaskan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan seni Taring Padi. Buku ini secara spesifik membahas hubungan antar instansi politik.

Pustaka selanjutnya adalah “Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998”, tulisan Jusuf Wanandi yang secara lugas membahas peristiwa penting pada masa Orde Baru dengan sudut pandang “orang dalam”. Buku ini juga merangkum sejarah perpolitikan Indonesia selama tiga generasi, masa transisi, Orde Baru, dan reformasi. Karya tulis ini menjadi penting guna mendapatkan pemahaman terhadap jatuhnya pemerintahan Suharto pada tahun 1998. Dalam buku karya Jusuf Wanandi ini, latar belakang peristiwa yang melahirkan Taring Padi dapat dilihat dengan lebih jelas.

Laporan penelitian berjudul “Sejarah Pergerakan Seni Radikal di Dalam Transisi Kekuasaan Indonesia (1930-2000)” karya Angie Bexley menjadi sumber pustaka selanjutnya. Karya ini merupakan olahan laporan penelitian yang berfokus pada kegiatan Taring Padi pada tahun 2000. Pembahasan mengenai pergerakan seni yang berpihak kepada kepentingan rakyat menjadi inti buku.

Penulisan yang mengedepankan penggalian sejarah dengan fokus seni progresif menjadikan buku ini kaya akan informasi mengenai bagaimana Taring Padi berdiri dan ideologi apa yang melatar belakanginya. Tulisan yang terlahir dari pengalaman lapangan selama tujuh minggu bisa menggambarkan kejadian real kelompok seni progresif.

Skripsi dengan judul “Gerakan sosial Pekerja Seni Yogyakarta, Kajian Mengenai Strategi gerakan sosial Lembaga Budaya Kerakyatan (LBK) Taring Padi Yogyakarta” karya I Ketut Putera Erawan dari UGM menjadi rujukan pustaka terakhir. Karya tulis ini mengambil fokus Taring Padi dari sudut pandang sosialnya. Kegiatan Taring Padi yang dikaji dengan pendekatan sosial menjadi sangat relevan, terutama karena ideologi kelompok Taring Padi beraliran sosial. Selain itu, kajian dengan pendekatan sosial juga dianggap perlu, sehubungan dengan kedekatan Taring Padi dengan masyarakat. Skripsi karya I Ketut Erawan menjadi acuan berpikir dalam penelitian ini. Tulisan dengan sudut pandang sosial menjadi pembanding dalam penulisan yang kental urusannya dengan ideologi, sehingga tulisan yang dihasilkan bisa lebihimbang, baik dari sudut pandang seni, maupun sosialnya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1. Dinamika Sosial-Politik

Dinamika sosial-politik merupakan tindak lanjut dari dinamika sosial. Jika dinamika sosial didasarkan pada interaksi sosial dan kemudian akan mendorong munculnya interaksi sosial,² maka dinamika politik merupakan usaha untuk

² Budiati, A.C., “*Sosiologi Kontekstual: Untuk SMA dan MA kelas X*”. Jakarta. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. h. 47

mencapai keteraturan sosial, melalui dinamika sosial.³ Dalam interaksi sosial-politik, komunikasi dua pihak menjadi satu elemen penting. Komunikasi mengantarkan pada keharmonisan hubungan, dan harmonisasi hubungan mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat luas (*good government*).⁴ Tetapi pandangan ini bukanlah pandangan *exact* karena interaksi atau dinamika akan membawa kepada berbagai kemungkinan, seturut dengan kelompok yang berinteraksi.

Dalam sudut pandang penelitian ini, dinamika sosial-politik di Indonesia dapat dikaji dalam beberapa peristiwa sejarah. Secara kontekstual, reformasi 1998 yang membawa Indonesia ke dalam satu dinamika sosial-politik baru menjadi bukti bagaimana interaksi tanpa komunikasi menghasilkan degradasi hubungan antar dua kelompok. Dalam hal ini, kita dapat melihat bagaimana pemerintah, mempersonifikasikan dirinya sebagai *good government* atau *bad government*.⁵

Dinamika sosial-politik Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintah mengambil peran sebagai penguasa yang tegas dan sering keputusan yang diambil bersebrangan dengan kepentingan masyarakat luas. Bentuk-bentuk diskriminasi atau represi yang dipakai pemerintah demi terciptanya keteraturan tidak jarang menimbulkan guncangan sosial dan berujung pada penurunan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bentuk komunikasi yang diambil Orde Baru menimbulkan *snowball effect* di akhir masa pemerintahannya. Keresahan masyarakat yang tidak lagi terbendung serta bentuk komunikasi politik yang tidak sejalan dengan publik menimbulkan

³ Rusfiana Yudi, Ismail Nurdin,. "*Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal Dengan Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*". Bandung. Alfabeta cv. 2017. h. 39.

⁴ Woro Diah. "Penerapan *Good Governance* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian". JAID, Vol 2, no. 1, 2020. h.2

⁵ *Ibid*

gelombang protes di kalangan masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa bentuk dinamika politik sangat mempengaruhi dinamika sosial dan juga sebaliknya.

1.5.2. Gerakan Sosial

Gerakan sosial konsep yang bisa didefinisikan secara langsung. Hal ini berkaitan dengan aneka ragam gerakan sosial. Dalam beberapa tulisan, peneliti seperti Giddens dan Sydney Tarrow, berusaha mendeskripsikan gerakan sosial ini. Dari keduanya terdapat pengertian yang saling beririsan, yaitu kolektivitas. Seperti dikutip dalam Giddens mendeskripsikan bahwa gerakan sosial adalah satu sikap kolektif dalam usaha mengejar kepentingan bersama. Sementara itu, Sydney Tarrow, mendeskripsikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif berdasarkan tujuan bersama dan solidaritas sosial. Dari dua deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial didasarkan pada kolektivitas yang bersifat menentang dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.⁶

Secara kontekstual, pandangan Tarrow yang menempatkan gerakan sosial ke dalam kategori politik perlawanan dapat dipakai. Kategori ini menempatkan interaksi antara kelompok masyarakat biasa dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh. Masyarakat berpengaruh diartikan sebagai kelompok yang memiliki otoritas yang lebih besar dari kelompok masyarakat. Perlawanan muncul karena adanya kesempatan dan hambatan politik sedang mengalami perubahan. Kemudian dengan dukungan jaringan sosial, maka politik perlawanan yang

⁶ Suharko,., gerakan sosial di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 10, No 1. Juli 2006. h. 3.

disuarakan dan disimbolkan melahirkan interaksi berkelanjutan dengan pihak lawan, dan menghasilkan gerakan sosial.⁷

Selanjutnya, Tarrow mengidentifikasi ada empat dasar agar suatu tindakan kolektif (kelompok) bisa dikategorikan ke dalam gerakan sosial.

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Pembeda paling kentara antara gerakan sosial dengan tindakan kolektif lainnya adalah adanya respon kolektif terhadap suatu gejolak sosial-politik melalui aksi langsung. Biasanya, respon tantangan ini muncul dari pemangku kepentingan.⁸ Tantangan kolektif sering ditandai dengan tindakan *interpose* terhadap aktivitas tindakan lain. Secara mudah, deskripsi ini tergambar dalam aktivitas demo di jalanan. Tidak hanya itu saja, dalam sistem yang represif, tantangan tersebut disimbolkan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek dengan simbol baru.

b. Tujuan bersama (*common purpose*)

Dalam urusan berorganisasi, terdapat banyak alasan untuk menjalaninya. Alasan ini mencakup alasan pribadi atau internal maupun eksternal yang disebabkan oleh respon individu terhadap lingkungan sosial. Namun, jika dikaji lebih dalam terdapat satu alasan paling jelas mengapa individu terikat dalam gerakan sosial, yakni adanya kemauan atau dorongan untuk menyusun klaim bersama dan menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau elit. Munculnya alasan ini tidak terikat hanya pada urusan atau kepentingan kelas,⁹ tetapi tumpang tindih kepentingan dan nilai yang menjadi penguat dalam terlaksananya tindakan bersama.

⁷ *Ibid.* h. 4.

⁸ *Ibid.* h.5

⁹ *Ibid.*h. 6

c. Solidaritas dan identitas kolektif

Kepentingan bersama merupakan faktor penting dalam tindakan bersama, yakni dapat merubah wacana menjadi aksi nyata. Selain itu, kepentingan bersama juga mempengaruhi common denominator atau sesuatu yang menggerakkan secara bersama. Keduanya bisa dicapai jika kelompok dapat membangun solidaritas atau pun identitas bagi semua anggotanya. Biasanya nasionalisme, etnis, atau keyakinan agama digunakan sebagai semangat dalam membangun solidaritas kolektif untuk melaksanakan gerakan sosial yang nyata.

d. Memelihara politik perlawanan

Pemeliharaan politik perlawanan di sini, bukan berbicara mengenai memupuk hubungan buruk dengan pihak lawan, pemangku otoritas atau kaum elit. Pemeliharaan politik perlawanan berbicara mengenai sikap untuk tetap ingat terhadap ‘akar’ atau tujuan perlawanan, yaitu mengkoreksi sikap negatif pemangku otoritas. Tanpa adanya aksi memelihara ini gerakan sosial akan kehilangan esensi perlawanannya. Memelihara politik perlawanan juga bisa diartikan sebagai siap menjadi oposisi sehat terhadap kelompok lawan.

1.5.3. Seni

Untuk bisa melihat seni secara kontekstual, konsep estetika postmodern Jean-Francois Lyotard bisa digunakan sebagai dasar berpikir. Seperti yang dikutip dari pemikiran Lyotard, seni mampu menghadirkan sebuah realitas lain (sensasi berdasarkan emosi) yang dapat melawan konsep yang sudah ada. Pandangan Lyotard mengenai estetika tidak terbatas pada esensi *pleasure and displeasure*,¹⁰

¹⁰ Secara kontekstual, Lyotard menjelaskan bahwa konsep seni yang ditabrakkan dengan realita mampu mendong munculnya sebuah perasaan senang (*pleasure*) dan tidak senang (*disspleasure*). untuk lebih jelas dalam memahami konsep berpikir Lyotard, baca Seni Nirmanusia, seluk estetika postmodern Jean-Francois Lyotard, yang ditulis oleh Yongky Gigih Pasisko.

atau pertentangan emosi yang berkaitan dengan indra. Lebih jauh, Lyotard ingin mengajak masyarakat serta pemikir untuk menempatkan estetika sebagai cara pikir. Hal ini adalah menempatkan sebuah batasan konsep pada ketidak terbatasan, dapat melawan, dan terus menciptakan sesuatu yang baru. Konsep tersebut sudah masuk kedalam fungsi dari seni. Ringkasnya, Lyotard berusaha untuk meromantisasi sebuah konsep berpikir dengan mengedepankan emosi (sensasi) untuk menciptakan lebih banyak realitas (rekonstruksi). Menurutnya, estetika sebagai cara berpikir memiliki beberapa element penting yang harus dibawa, yaitu *reflective judgment*¹¹ dan imajinasi yang kemudian dikoreksi kembali dengan perasaan sesuai maupun tidak.

Pemikiran Lyotard dalam konteks estetika dan hubungannya dengan masyarakat luas, secara praktis bisa dilihat melalui bagaimana kelompok seni Dada merepresentasikan dirinya. Dada pada tahun 1916, memosisikan dirinya sebagai kolektif dalam mendorong seni murni klasik ke arah pemikiran yang lebih modern dan terbuka. Dada hadir sebagai kelompok seni yang menentang kemapanan, baik kemapanan berpikir, hidup, maupun keadaan sosial. Mereka bahkan hadir sebagai kelompok seni anti, anti perang, anti borjuis, anti standar mayoritas.¹²

Semangat baru Dada terbawa ke Indonesia. Medium seni tidak lagi terbatas untuk konsumsi galeri tetapi telah mencangkup kepentingan bersama, terutama kesadaran terhadap keadaan sosial. Taring Padi mempraktikkan seni yang demikian dengan tetap mengedepankan pendekatan budaya. Penggunaan

¹¹ Dalam konsep berpikir Lyotard, *Reflective Judgement* digambarkan sebagai sebuah cara berpikir dalam memahami seni sebagai perenungan, yang kemudian memiliki dampak bagi audiencenya, atau mampu memunculkan cara berpikir baru melalui perenungan.

¹² *Contemporary Movements in European Painting*. The Toledo Museum of Art, Toledo, 1938. h. 3.

wayang kardus sebagai salah satu medium protes menjadi satu bukti bahwa budaya dan seni bisa tetap relevan di dunia yang dinamis ini. Pemikiran kelompok tentang urgensi kesadaran dan penyuaran diprakarsai dengan kondisi sosial yang ambigu. Taring Padi membaurkan karya mereka ke dalam demonstrasi, ikonografi, permainan slogan, penggambaran dunia utopis melalui poster atau spanduk menjadi tema karya Taring Padi. Ini merupakan bentuk implementasi seni dengan tujuan dan cara baru, di mana seni dikreasi relevan dengan problem dan harus berpihak kepada rakyat.

1.5.4. Kelompok Seni 'Radikal'

Untuk melihat secara kontekstual bagaimana seni radikal, contoh paling dekat dan juga menjadi subyek penelitian ini adalah Taring Padi. Ugeng dalam jurnal Karbon terbitan Ruang Rupa, menyebutkan serta menggambarkan Taring Padi sebagai kelompok seni yang memiliki tendensi politis.¹³ Politis disini tidak serta merta diartikan sebagai sebuah usaha politik praktik dan berafiliasi dengan partai politik tertentu. Menurut Ben. K. C. Laksana dalam *zine* Pendidikan Demokratis Untuk Semua politis disini memiliki arti sebagai proyeksi visi akan manusia dan masyarakat.¹⁴ Tendensi yang demikian menjelaskan bahwa melalui dinamika kelompok dengan sosialnya akan sering terjadi ketegangan, terlebih secara politis, Taring Padi memiliki kecenderungan untuk memihak yang tertindas.¹⁵

¹³ Darmawan Ade, Ugeng T. Moetidjo. *Publik, Guna, dan Akalcara, Tidak Terkadang : Bertempatlah itu dalam Seni Rupa*. Vol 1, Jurnal Karbon, Keindahan Lawan Keszamanan. 11/2000. h 5

¹⁴ Kristian Ben Citto Laksana. "Pendidikan Demokrasi untuk Semua". Pribadi. 2021. h. 7

¹⁵ Adin, Ajeng Nurul Aini, Aries Syarifuddin, dkk. "*Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolektif Seni Indoneisa dalam Sepuluh Tahun Terakhir*". Yayasan Gudskul Studi Kolektif. Jakarta. 2021. h. 148-149

Radikal disini diartikan sebagai pandangan yang menitik beratkan pada realita dan penawaran solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁶ Radikal ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan atau ciri khusus dimana, kelompok seni berusaha menyejajarkan pandangan mereka dengan realita sosial yang ada. Kelompok seni radikal memiliki hubungan erat dengan gerakan sosial. Dikarenakan basis mereka adalah kelompok masyarakat yang dinamis dan bukan statis. Menilik kembali bahasan diatas mengenai gerakan sosial yang mengedepankan politik perlawanan, maka kelompok seni radikal bisa diartikan demikian juga. Mereka memfasilitasi suara rakyat sebagai kelompok yang lebih dominan (kelompok yang lebih vokal) dan menggunakan media seni sebagai identitas bersama. Kedekatan kelompok seni radikal dengan gerakan sosial adalah bahwa dua-duanya berfokus pada aksi nyata menyuarakan perlawanan.

1.5.5. Dinamika Seni Kerakyatan

Dinamika seni kerakyatan di Indonesia secara kesejarahan tidak bisa dilepaskan dari usaha yang dilakukan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Lekra yang berdiri pada tahun 1950 mengemban tugas untuk menciptakan sebuah budaya autentik Indonesia dan terlepas dari keterikatan budaya Barat. Orientasi kebudayaan di atas juga merupakan mandat serta cita-cita Soekarno sebagai pemikir sekaligus Bapak Bangsa. Seni kerakyatan sendiri cukup sulit untuk dijelaskan secara singkat tanpa memahami konteks dan kesejarahannya. Secara sempit, seni kerakyatan Indonesia memiliki corak sosialis yang cukup kuat. Hal ini terlihat dari kerja seni Lekra yang mengedepankan praktik karya dengan

¹⁶ Bexley Angie,. Laporan Penelitian Lapangan. *"History of the Radical Art Movement in the Transition of Authority in Indonesia (1930-2000)"*. (Canberra: Australia National University, 2000). h. 10

melibatkan masyarakat akar rumput, serta memiliki kecenderungan untuk menggunakan permasalahan aktual sebagai konsesi berkesenian.

Seni kerakyatan yang tumbuh di Indonesia merupakan sebuah respon “modernitas” yang selalu dikonotasikan dengan budaya Eropa dan hal ini dianggap sebagai sikap mabuk Barat.¹⁷ Urgensi yang demikian memaksa pemikir, budayawan, serta seniman Indonesia untuk membentuk budaya khas Indonesia, yang sesuai dengan ide nasionalisme Indonesia. Kedekatan seni kerakyatan dengan nilai sosialis memang terlihat dari mukadimah Lekra serta pernyataan Aidit dan Njoto, bahwa pengaruh pemikiran Marxis digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan pandangan nasionalis.¹⁸ Pandangan Marxis ini digunakan untuk secara kritis melihat dan mengembangkan kebudayaan demokratis kerakyatan. Untuk itu rakyat ditempatkan setara dengan kaum intelektual dan mahasiswa dengan tujuan untuk membentuk budaya kerakyatan.

Hubungan antara budaya kerakyatan dengan seni kerakyatan bisa dilihat dari fokus kerja Lekra pada dunia seni. Tidak terbatas hanya pada seni lukis maupun sastra, Lekra dalam usaha membentuk budaya kerakyatan juga melakukan pendekatan kepada rakyat melalui seni yang bersifat kedaerahan dan autentik. Sebuah usaha yang dilakukan Lekra untuk menciptakan tradisi nasionalis proletar.¹⁹

¹⁷ Foulcher Keith. “*Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni : Sejarah Lekra 1950 - 1965*”. Pustaka Pias. Bandung. 2021. h 21.

¹⁸ *Ibid.* h. 25

¹⁹ *Ibid.* h. 35

1.6. Metode dan Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Sebagai penelitian sejarah, penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.6.1.1. Pemilihan Topik

Langkah awal dalam penelitian sejarah adalah menentukan topik pembahasan. Tujuan dari pemilihan topik adalah untuk memfokuskan bahasan atau penelitian yang akan dilakukan. Terdapat dua faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti dalam menentukan topik yaitu kedekatan emosional dan intelektual.

Kedekatan emosional berbicara mengenai kedekatan atau familiaritas topik penelitian dengan peneliti. Terdapat dorongan internal dari diri peneliti untuk menulis sebuah topik. Sedangkan kedekatan intelektual berbicara mengenai kemampuan kognitif peneliti dalam mengkaji topik dan permasalahan dalam penelitian ini.²⁰

Dengan berpegangan pada deskripsi diatas, peneliti memutuskan untuk mengambil topik *Taring Padi dalam Dinamika Sosial Politik Indonesia 1999-2000*. Pemilihan topik ini didasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap dunia seni. Dipicu oleh tulisan salah satu jurnalis musik di kanal *Youtube Sound From the Corner*, yang pada saat itu mengulas tentang band Pandai Besi. Terdapat pernyataan atau ungkapan yang menarik bahwa “musik digunakan sebagai sebuah pergerakan sosial-politik, untuk membangun kewaspadaan, dan pesan kepada khalayak ramai”. Dunia seni yang bagi orang biasa hanya diromantisasikan

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya. 1995. h. 70.

sebagai sebuah imaji utopis seniman dan pembangunan narasi untuk kepentingan pribadi, ternyata menampakkan wajah lainnya pada saat itu. Berdasarkan perasaan itulah, peneliti memberanikan diri untuk mengambil topik seni progresif dalam merespon dinamika sosial-politik di Indonesia, terutama pada periode transisi dari Orde Baru ke reformasi di tahun 1999-2000.

1.6.1.2. Pengumpulan Sumber

Pengumpulan sumber atau heuristik merupakan langkah kedua dalam metode penelitian penelitian sejarah, yakni setelah topik berhasil ditetapkan. Pengumpulan sumber harus dilakukan secara selektif agar sumber-sumber yang terkumpul relevan dengan topik yang dibahas.²¹ Terdapat dua jenis sumber yang harus dipenuhi dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah catatan tertulis berupa wawancara, observasi kegiatan kelompok (pameran dan diskusi), arsip berupa dokumentasi karya, kegiatan kelompok, dan arsip video dokumenter. Buku *Taring Padi - Seni Membongkar Tirani* diambil sebagai sumber primer dikarenakan didalam buku ini terdapat arsip karya Taring Padi pada tahun 1998-2011. Dalam proses pengambilan sumber primer lainnya, peneliti melakukannya dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah melakukan wawancara pada bulan September tahun 2022. Wawancara ini dilakukan dengan kelompok Taring Padi yang bertempat di desa Sembungan, Kasihan, Bantul. Bertepatan dengan kegiatan kumpul rutin mereka yang dinamai *senenan*. Selanjutnya, peneliti juga mengikuti

²¹ *Ibid.* h. 73.

beberapa kegiatan diskusi yang di narasumberi oleh anggota kelompok Taring Padi atau individu yang berkenaan dengan praktik kerja Taring Padi seperti Yayak Yatmaka dan Gus Muh. Arsip dokumentasi kegiatan yang dimiliki oleh peneliti didapatkan dari beberapa tempat, antara lain arsip kelompok Taring Padi, perpustakaan IVAA (Indonesia Visual Art Archive), dan beberapa buku biografi kelompok. Sedangkan untuk arsip video dokumenter, peneliti mendapatkannya melalui salah satu teman peneliti yang bekerja di satu kolektif arsip seni Yogyakarta.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah buku, jurnal dan arsip yang membantu menjelaskan dan memiliki keselarasan bahasan dengan tema. Buku dan jurnal tersebut antara lain, buku Pengantar Sosiologi karya Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, buku Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia” karya Benedict Anderson dan diterjemahkan oleh Revianto Budi Santosa, dilanjutkan dengan buku Menyibak Tabir Orde Baru : Memoar Politik Indonesia 1965-1998, hasil tulisan Jusuf Wanandi, kemudian laporan penelitian lapangan berjudul Sejarah Pergerakan Seni Radikal di Dalam Transisi Kekuasaan Indonesia (1930-2000) karya Angie Bexley, ditutup dengan skripsi berjudul “Gerakan sosial Pekerja Seni Yogyakarta, Kajian Mengenai Strategi gerakan sosial Lembaga Budaya Kerakyatan (LBK) Taring Padi Yogyakarta” karya I Ketut Putera Erawan. Dilanjutkan jurnal “Lekra dan Seni Kerakyatan: Kajian Karya Pelukis Lekra Periode 1950-1965” karya Della Tristani Djajadi, kemudian

dilanjutkan jurnal “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani” karya Suharko, dan diakhiri dengan jurnal berjudul “Seni Sebagai Sarana Interaksi Sosial” tulisan Wadiyo, dan lain-lain. Sumber sekunder ini bisa didapatkan dengan mencarinya secara daring, meminjam di perpustakaan, atau membeli di toko buku.

1.6.1.3. Verifikasi Sumber

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian sejarah adalah verifikasi atau kritik sumber. Dalam tahap verifikasi ini terdapat dua proses, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menguji orisinalitas atau keaslian sumber. Sedangkan intern berkaitan dengan pengujian validitas daya yang terkandung di dalamnya.²²

Dalam melaksanakan kritik ekstern, peneliti memeriksa keabsahan sumber dengan cara memeriksa keaslian sumber. Jika mengambil dari internet, maka memperhatikan mutu web yang akan diambil dan bila mengambil karya sebagai sumber, maka perlu diperhatikan keaslian karya (apakah karya asli yang diambil dari pelukisnya atau jika merupakan arsip apakah ada tanda yang menunjukkan keasliannya).

Selanjutnya untuk kritik intern, buku atau sumber yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap reputasi penulis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi atau informasi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, untuk uji kredibilitas dilakukan juga perbandingan antara buku satu dengan buku yang memiliki isi atau fokus bahasan yang setema.

²² *Ibid.* h. 77.

Dengan begitu peneliti mampu melakukan *cross-check* terhadap karya tulis yang dipakai sebagai sumber penelitian ini.

1.6.1.4. Interpretasi Data

Tahap interpretasi atau penafsiran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berkenaan dengan penguraian data yang sudah dihimpun menjadi fakta elaboratif. Selanjutnya, tahap sintesis adalah tafsir terhadap banyak data menjadi fakta konsep. Dalam tahap interpretasi ini, penguasaan terhadap teori dan konsep ilmu sosial yang berkaitan menjadi penting. Dengan begitu, hasil tafsir sejarah ini bisa memiliki unsur fakta.

1.6.1.5. Historiografi

Penulisan sejarah atau historiografi merupakan langkah terakhir dari rentetan tahap yang sudah dilakukan. Historiografi bisa dijelaskan sebagai langkah penulisan kembali suatu fenomena sejarah. Data yang sudah dikumpulkan dipilih, diseleksi, diverifikasi, dan diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam tulisan sejarah yang utuh. Penulisan sejarah juga harus sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Penyajian secara sistemik dan deskriptif menjadi point penting dalam penulisan ini. Karena penelitian ini merupakan karya ilmiah, maka historiografinya bersifat deskriptif analitis.

1.6.2. Metodologi Penelitian

1.6.2.1. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial dan historis. Pembahasan mengenai Taring Padi tidak pernah bisa dilepaskan dari kajian sosial. Sedangkan pengambilan contoh pada waktu

masa transisi era dari orba ke reformasi berada pada ranah sejarah. Sehingga paling tepat jika penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan historis.

Selain itu, mengingat penelitian ini dilakukan dalam konteks penyusunan skripsi sejarah, maka pendekatan historis menjadi penting. Dengan artian bahwa peneliti melakukan penelusuran dinamika yang terjadi pada Taring Padi dari waktu ke waktu.

1.6.2.2. Metode penulisan

Seturut dengan metodologi penulisannya, model dari hasil penelitian ini adalah deskripsi analitis. Konstruksi penulisan tidak hanya berpaku pada narasi saja, tetapi harus dilengkapi dengan eksplanasi atau penjelasan. Dinamika sosial-politik yang diresponi Taring Padi dideskripsikan secara diakronik. Selanjutnya, penulisan disusun secara sistematis dengan memperhatikan persoalan yang dibahas dan pendekatan yang dipakai.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi kedalam lima bab dengan penjabaran sebagai berikut :

BAB I Bab I yang berisikan pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

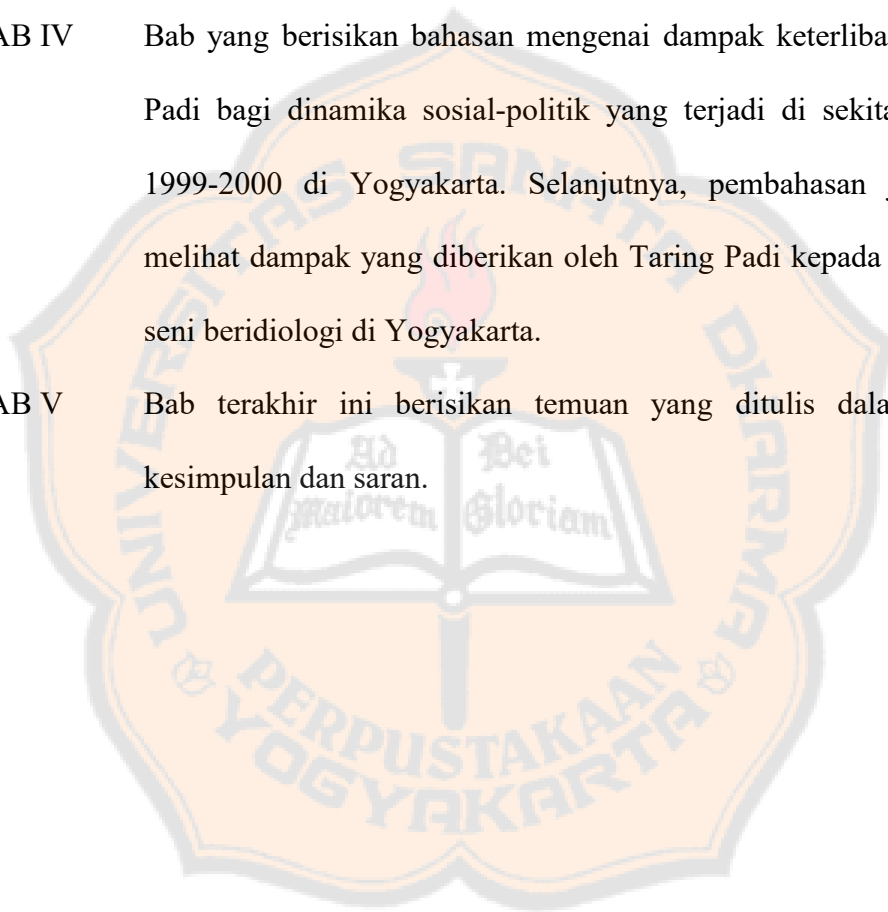
BAB II Bab ini berisikan pembahasan mengenai keadaan politik Indonesia pada tahun 1998. Apa yang melatar belakangi terjadi demonstrasi yang berakhir pada selesainya Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. selain itu, pada bab ini juga akan dibahas menangani

korelasi antara peristiwa 1998 dengan berdirinya Taring Padi.

BAB III Bab ini membahas keterlibatan dan ideologi dasar Taring Padi. Pembahasan pada bab ini akan lebih difokuskan pada bagaimana kegiatan Taring Padi di kelompok masyarakat dan bagaimana mereka menyuarakan suara rakyat dengan pendekatan seni di tiap aksi mereka.

BAB IV Bab yang berisikan bahasan mengenai dampak keterlibatan Taring Padi bagi dinamika sosial-politik yang terjadi di sekitaran tahun 1999-2000 di Yogyakarta. Selanjutnya, pembahasan juga akan melihat dampak yang diberikan oleh Taring Padi kepada komunitas seni berideologi di Yogyakarta.

BAB V Bab terakhir ini berisikan temuan yang ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB II

KEADAAN POLITIK INDONESIA 1998

2.1 Politik Orde Baru

“Un monde où tout le monde soit heureux” - a world where everybody should be happy. Merupakan kalimat yang sering dikutip oleh Bung Hatta, dalam konteks untuk mewujudkan semangat kemerdekaan nasional. Kutipan diatas bisa dikatakan juga semangat bersama dimana negara harusnya mampu mewujudkan sebuah bentuk perasaan bahagia bagi masyarakatnya. Nampaknya apa yang diharapkan oleh Bung Hatta mendapati banyak rintangan, terutama dari sistem politik di negaranya sendiri. Realitas yang diharapkan Bung Hatta bertolak belakang dengan praktik politik yang terjadi pada masa pertumbuhan negara. Berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru membawa perubahan mendasar, dan merekonstruksi hampir sebagian besar kehidupan sosio-politik Negara. Perbedaan budaya politik dan latar belakang Soeharto (presiden kedua RI) memberikan sudut pandang baru, dimana kontrol merupakan hal yang mutlak dan perlu dilakukan agar tercapai keselarasan, dengan tujuan akhir untuk menyejahterakan masyarakat.

Pemilihan budaya kontrol sebagai satu bentuk budaya politik Orde Baru tidak jauh dari latar belakang militer Soeharto. Dalam diskusi peneliti pada tanggal 17 Agustus 2022,² Yayak Yatmaka sebagai salah satu narasumber memaparkan bahwa peralihan budaya yang terjadi pada masa Orde Baru merupakan sebuah hal lumrah. Peralihan atau penggantian budaya politik

² Diskusi yang dilaksanakan oleh ArtJog dengan tema “Seni dan Sensor” dengan narasumber Yayak Yatmaka dan Gus Mus. Dalam diskusi ini dilakukan pemaparan yang cukup mendalam terhadap bagaimana Orde Baru melaksanakan praktik budaya mereka sebagai sebuah usaha untuk mengamankan posisi. Dalam diskusi ini juga dibahas mengenai bagaimana seni dan politik serta publik saling berkolerasi.

merupakan upaya untuk menggantikan budaya lama yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau orientasi yang dipegang pemerintah. Orde Baru sebagai pemegang otoritas politik, melakukan sensor terhadap akses budaya maupun nilai (terutama nilai dengan tendensi kiri) dengan tujuan untuk menguatkan posisi pemerintah dan kepentingan kelompok atau pribadi.

Jika dicermati dengan lebih saksama, dapat dilihat bahwa kontrol akses atau sensor yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, bisa dikategorikan sebagai bentuk dominasi budaya.² Dominasi budaya ini juga termasuk bagaimana pemerintah Orde Baru meredefinisikan nilai (kerakyatan, sosial, keteraturan, dll) dengan tujuan untuk menjadikan nilai tersebut sebagai common sense bagi masyarakat secara luas. Bentuk budaya politik ini juga dinilai sebagai cara Orde Baru untuk mendefinisikan ulang wajah politik mereka atau sebagai bentuk pembangunan wacana heroisme (terutama pasca peristiwa 1965).

Terdapat dua peristiwa yang menggambarkan bagaimana pemerintah Orde Baru secara terang-terangan melakukan sensor melalui tindakan represi pada ranah pers. Peristiwa pertama adalah pembredelan hak tayang majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik pada tahun 1994, karena memuat adanya dugaan korupsi impor 39 kapal perang bekas Jerman Timur. Respon yang diberikan pemerintah waktu itu adalah dengan mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) milik Tempo, dengan dalih mengganggu stabilitas nasional. Peristiwa ini selanjutnya menjadi titik balik dalam usaha pembebasan hak sipil melalui media. Sehari setelah pencabutan SIUPP, wartawan Tempo, wartawan muda, aktivis, hingga mahasiswa melakukan long march ke kantor Kementerian Penerangan di

² Kristian Cito Laksana Ben. "Pendidikan Demokrasi Untuk Semua". Pribadi. 2021. h. 3-5.

Jalan Medan Merdeka Barat dengan tuntutan untuk membatalkan pencabutan SIUPP Tempo, Detik dan Editor. Dalam aksi ini, polisi melakukan “pengamanan” dan menyebabkan puluhan orang terluka.³ Buntut dari aksi pencabutan SIUPP ini memaksa Tempo untuk rehat selama empat tahun dan baru pada 1998 setelah lengsernya Orde Baru, Tempo kembali lagi ke industri media masa Indonesia.

Peristiwa kedua terjadi selang setahun sebelum pemilu tahun 1997. Dalam peristiwa kali ini cukup banyak intrik politik yang terlibat didalamnya. Bentuk represi yang dilakukan pada peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM terhadap para demonstran dan wartawan melalui tindakan Polisi dan TNI. Kejadian ini diawali dengan adanya dualisme dalam tubuh PDI, satu kubu berpihak kepada pemerintah dan satu lagi mengusung Megawati menjadi ketua umum. Perlu diketahui, dalam konteks pemerintahan Orde Baru ini Presiden Soeharto dengan tegas dan kuat berusaha mengurangi bahkan menutup langkah anak-anak Soekarno masuk dalam dunia politik.⁴ Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996 dikenal juga dengan nama peristiwa kudatuli. Dalam peristiwa bentrok masa ini, terdapat beberapa bentuk sensor informasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Sensor dan kontrol tersebut antara lain dengan mengerahkan TNI untuk menjaga RSCM sebagai tempat para korban bentrok dirawat, TNI juga dikerahkan untuk menjaga ruang jenazah, serta dalam penyelesaian kasusnya terus berdatangan kepada para penyidik.⁵ Tujuan akhir dari langkah yang diambil pemerintah Orde Baru adalah untuk menutupi

³ <https://nasional.tempo.co/read/1474929/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam> diakses pada 29 Oktober 2022, pukul 14.45 WIB.

⁴ Posisi ini menjelaskan bagaimana Soeharto untuk menjaga stabilitas politik dan kuasanya dengan mempermainkan dalih anti-Soekarno yang dianggap berafiliasi dengan ideisme Komunis.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/27/10170991/peristiwa-kudatuli-27-juli-1996-saat-megawati-melawan-tetapi-berakhir-diam> diakses pada 11 November 2022, pukul 10.45 WIB. Baca juga <https://historia.id/politik/articles/huru-hara-27-juli-1996-dalam-ingatan-wartawan-P4WmV> diakses pada 24 Maret 2023

realita aktual dari mata media, yang secara singkat bisa diartikan sebagai bentuk pemerintah dalam mengesampingkan kepentingan publik.

Budaya politik yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru dapat dilihat melalui susunan dan preferensi Soeharto dalam memilih jajaran menteri. Aliansi merupakan satu bentuk kecenderungan politik Orde Baru.⁶ Ini terlihat dari bagaimana presiden memilih jajaran menteri yang kontroversi seperti, pemilihan Siti Hardijanti Rukmana sebagai menteri sosial yang juga merupakan anak Soeharto, penunjukan Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismundar yang pro Soeharto dan “menormalisasi”⁷ represi bagi mahasiswa yang turun ke jalan, pengangkatan menteri perindustrian dan perdagangan Hartanto Sastrosoenarto yang didasarkan pada nepotisme, dan pemilihan Tomy Soeharto sebagai kepala pelaksana dalam beberapa kebijakan pemerintah (monopoli cengkeh dan proyek mobil nasional).⁸ Pemilihan menteri oleh Soeharto dengan jelas menunjukkan adanya nepotisme. Aliansi yang diterapkan pemerintahan Orde Baru, secara tidak langsung menyaratkan bahwa dalam badan eksekutif ini, sifat otoriter dan sentralistik menjadi kekuatan pemerintah dalam menuju Indonesia yang “pembangunan”. Penjabaran di atas sejalan juga dengan bagaimana Robinson menjelaskan format politik Orde Baru dalam konteks supremasinya.⁹

Basis sesungguhnya dari kekuasaan Soeharto adalah susunan instrusional dan aliansi politik yang telah dibangun [...] inilah elemen kekuasaan yang tidak secara otomatis terpindahkan pada penggantinya [...] sebab

⁶ Hendra Legowo Sivfian, “*Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996*”. Volume 1, Publik Budaya, 2013, h. 20.

⁷ Diartikan sebagai sikap membiarkan terjadinya perlakuan represi kepada mahasiswa oleh aparat dengan dalih bahwa mahasiswa bertindak diluar keharusan (belajar di kampus).

⁸ J.A Denny, “*Demokratisasi Dari Bawah: Aksi-Aksi Unjuk Rasa dan Perubahan Rezim di Indonesia 1997-1998*”, Jakarta, Cerah Budaya Indonesia, 2020, h. 196.

⁹ Legowo Sivfian Hendra, IG. Krisnandi, Hendro Sumartono. *Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996*. Vol 1, Publika Budaya, 2013, hal 20.

kekuasaan Soeharto tersusun terutama dari jaringan persekutuan politik dan ekonomi.

Pernyataan Robinson tersebut dapat menggambarkan kompleksitas kekuasaan dan pentingnya aliansi dalam tubuh politik pemerintahan Orde Baru. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemerintahan Orde Baru memang bukan sebuah negara yang demokratik, melainkan negara yang berkembang secara ekonomi, sehingga dalam dalam rangka mencapainya, kepentingan politik (masyarakat) dikesampingkan.¹⁰ Hal ini berpengaruh pada bagaimana rakyat luas memandang Orde Baru sebagai rezim pemerintahan yang otoriter. Kecenderungan badan pemerintah yang demikian, membawa sebuah ekosistem rivalitas kepada jajaran politik di bawahnya, dengan tujuan untuk bergabung bersama dengan aliansi Soeharto. Selanjutnya ekosistem politik yang demikian menghasilkan sebuah iklim “cari muka” untuk mendapat simpati dan prospek kerja yang baik pada pemerintahan Orde Baru. Efek langsung dari ekosistem yang demikian adalah makin dikesampingkannya permasalahan publik (masyarakat) dan berdampak pada penanganan publik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.¹¹

Realita politik di era Orde Baru dengan segala hiruk pikuk cari muka dan aliansinya, serta dampak sosial bagi masyarakat, menimbulkan satu bentuk gerakan kolektif untuk membebaskan diri dari kehidupan sosial politik yang tidak pasti. Gerakan kolektif yang dimaksud didasarkan pada aktivisme, dan dalam

¹⁰ *Ibid.* h. 19

¹¹ Dedi Agus. “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia”. Volume 7, Jurnal Moderat, 2021, h. 4-5.

konteks ini adalah aktivisme dengan perspektif estetika.¹² Seperti yang pernah dipaparkan oleh Taring Padi dalam sebuah seminar di kampus Institut Seni Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2022, aktivisme memiliki tujuan untuk membebaskan diri dari tekanan politik atau merupakan sebuah pembebasan politik. Jika dilihat bagaimana Taring Padi sebagai sebuah kelompok kolektif seni berdinamika dengan pemerintah Orde Baru, maka akan terlihat bahwa keduanya sedang melakukan negosiasi budaya. Politik ekonomi gaya Orde Baru, dipandang oleh Taring Padi sebagai sebuah penggeseran prinsip demokrasi dan dalam implementasinya justru banyak mendiskreditkan masyarakat akar rumput. Dalam kacamata Taring Padi, bentuk budaya Orde Baru adalah sebuah budaya yang diciptakan khusus untuk kaum borjuis. Perbedaan realitas (budaya) ini yang kemudian dinegosiasikan oleh Taring Padi, terutama pada peristiwa reformasi 1998.

2.2 Pecahnya Rusuh 1998

Kerusuhan 1998 merupakan puncak dari dinamika sosial politik ekonomi yang sudah dimulai sejak awal 1990-an. Tahun 1997 menjadi penanda munculnya permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh gelembung ekonomi.¹³ Gelembung ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara kala itu disebabkan karena peningkatan nilai objek yang terlalu cepat. Krisis dimulai di Thailand, kemudian secara cepat merembet ke seluruh negara di Asia Tenggara. Dalam menangani krisis ekonomi ini respon dan keputusan yang diambil pemerintah sangat krusial, karena menentukan masa depan Indonesia. Untuk menangani permasalahan, pemerintah

¹² Sebuah bentuk kegiatan aktivisme dengan menggunakan pendekatan seni sebagai sebuah jembatan kegiatan.

¹³ Ramli Rizal. “*Ekonomi Indonesia 1998: Tahun Koreksi (a Year of Correction)*”. Volume 3, Jurnal Ketahanan Nasional, 1998. h. 1-5.

mengajukan permohonan bantuan kepada IMF (International Monetary Found) 8 Oktober 1997 dan disetujui pada 31 Oktober 1997.¹⁴ Langkah yang diambil oleh IMF dalam memberikan bantuan pemulihan ekonomi Indonesia adalah dengan memberikan dana bantuan sebesar 43 miliar dolar AS dan langkah pemulihan ekonomi berupa Letter of Intent (LOI).¹⁵ Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 benar-benar sedang mengalami penurunan drastis. Terlihat dari kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, penutupan banyak sektor usaha, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁶

Permasalahan moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi dan berkembang lagi menjadi krisis multidimensional pada tahun 1998. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya perubahan krisis di Indonesia. Beberapa faktor tersebut adalah dinamika pasar keuangan yang berada di luar batas dan kebijakan finansial pemerintah yang lemah. Kebijakan finansial pemerintah terlihat juga dari ketidakjelasan komitmen pemerintah Orde Baru dalam menangani krisis ini bersama IMF. Ketidakjelasan komitmen pemerintah, disebabkan oleh respon masyarakat terhadap krisis. Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa oleh masyarakat dengan melakukan penarikan uang di berbagai bank, setelah

¹⁴ Astriyani Wndri, Haryo Rinardi. “Hubungan Letter of Intent (LOI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)”. Volume 2, Historiografi, 2021, h. 121

¹⁵ Letter of Intent, merupakan rangkuman kebijakan-kebijakan yang harus diambil pemerintah Indonesia sesuai saran dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi.

¹⁶ Susilo Y. Sri, Budiono Sri Handoko. “Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektor industri : Pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan Indorani”. Volume 17, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2002. h. 251.

munculnya kebijakan untuk melikuidasi 16 bank yang dinilai sakit.¹⁷ Imbas kepanikan masyarakat ini adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan peningkatan utang luar negeri Indonesia dan swasta pada akhir Desember 1997.¹⁸

Hubungan IMF dengan pemerintah Orde Baru menunjukkan adanya fluktuasi kepercayaan. Presiden Soeharto meresponi cara IMF menyelesaikan krisis dengan setengah hati.¹⁹ Jika presiden Soeharto melihat bahwa cara yang dipakai IMF tidak menunjukkan hasil positif maka, dengan cepat Orde Baru bermanuver dengan kebijakan moneter versinya, dan hal tersebut menimbulkan krisis kepercayaan IMF dan penyelesaian krisis yang setengah-setengah. Awal 1998, setelah LOI kedua disepakati oleh pemerintah dan IMF tidak menunjukkan banyak perubahan, maka pemerintah berinisiatif untuk memecahkan krisis dengan menerapkan kebijakan baru yang dinilai tidak sesuai dengan LOI yang telah disepakati. Keputusan tersebut membuat hubungan pemerintah dan IMF menjadi tegang.

Keputusan pemerintah dengan meminta bantuan IMF juga dinilai terlalu tergesa-gesa dan cara yang diberlakukan oleh IMF untuk menangani krisis moneter di Indonesia juga dianggap akan memperburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁰ Menurut Rizal Ramli, keputusan yang diambil oleh pemerintah dan IMF akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang diikuti inflasi,

¹⁷ Likuidasi bank : Tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank (Peraturan Lembaga penjamin Simpanan/no. 12/2010).

¹⁸ Astriyani Wndri, Haryo Rinardi. “*Hubungan Letter of Intent (LOI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)*”. Volume 2, Historiografi, 2021, h. 121

¹⁹ Ramli Rizal. “*Ekonomi Indonesia 1998: Tahun Koreksi (a Year of Correction)*”. Volume 3, Jurnal Ketahanan Nasional, 1998. h. 5

²⁰ Ramli Rizal. “*Ekonomi Indonesia 1998 : Tahun Koreksi (a Year of Correction)*”. Volume 3, Jurnal Ketahanan Nasional, 1998. h. 7.

peningkatan pengangguran dan kesenjangan sosial-ekonomi. Pandangan tersebut terbukti dengan adanya kenaikan harga BBM dan listrik, kebutuhan hidup, serta peningkatan jumlah pekerja yang mengalami-PHK (Putus Hubungan Kerja) dikarenakan banyak tempat usaha yang gulung tikar.

Memasuki tahun 1998 keadaan Indonesia tidak berkinerja baik.²¹ Demonstrasi dan aksi keprihatinan mahasiswa menjadi agenda utama pada awal tahun 1998. Tema penolakan kenaikan harga BBM, listrik, dan kebutuhan pokok menjadi point utama yang disuarakan oleh mahasiswa. Dalam proses ini juga muncul beberapa penolakan terhadap terpilihnya kembali Presiden Soeharto untuk ke-tujuh kalinya dan gaung reformasi juga mulai bermunculan dengan fokus utama untuk menurunkan posisi Soeharto sebagai presiden RI. Jalannya demonstrasi oleh mahasiswa sebagai bentuk keprihatinan terjadi di beberapa daerah, bukan hanya di Jakarta saja. Yogyakarta sebagai salah satu kota dengan jumlah pelajar yang cukup banyak juga mengalami dinamikanya sendiri. Salah satu peristiwa besar yang terjadi di awal tahun 1998 adalah demonstrasi pada 8 Mei atau dikenal juga dengan peristiwa Gejayan. Peristiwa ini diawali dengan aksi damai yang dimulai pada pukul 09.00 WIB oleh sejumlah kampus di Yogyakarta dan pada pukul 13.00 WIB, konsentrasi demonstran berada di UGM (Universitas Gajah Mada) dengan melakukan aksi damai berupa orasi dan pembakaran patung Soeharto serta banner yang dibuat oleh rekan-rekan ASRI (kemudian membentuk Taring Padi).²² pada waktu yang bersamaan demonstran dari UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) dan USD (Universitas Sanata Dharma) juga melakukan aksi

²¹ Kumpulan surat kabar baik Kompas, Kedaulatan Rakyat, dan Bernas yang diperoleh dari Arsip Jogjakarta, dengan periode pembacaan surat kabar dari Februari sampai April 1998.

²² Witjaksono Bambang, dkk. "*Taring Padi, Bara Lapar Jadikan Palu*". Galeri RJ.Katamsi. Yogyakarta. 2018. h. 37.

damai di Jalan Gejayan. Menjelang sore hari, demonstran dari Gejayan mulai bergerak menuju UGM tetapi mereka dihadang oleh aparat, karena ada kekhawatiran untuk menimbulkan masa yang lebih besar dan penolakan ini berujung pada bentrokan yang terjadi oleh kedua belah pihak. Peristiwa ini berakhir dengan jatuhnya banyak korban baik dari demonstran maupun warga sekitar, salah satu demonstran yang gugur dalam peristiwa ini adalah Moses Gatotkaca yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama jalan di selatan kampus USD.

Jakarta sejak awal tahun diwarnai dengan berbagai bentuk aksi keprihatinan. Aksi demonstrasi tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi dalam beberapa peristiwa lapisan masyarakat juga terlibat, terutama masyarakat yang merasakan “represif” oleh pemerintah melalui kebijakan atau putusan yang sudah diambil. Bentuk “represi” tersebut adalah kenaikan harga BBM yang mengharuskan supir angkot di Jakarta mengalami kerugian karena adanya penurunan pendapatan serta, unjuk rasa oleh buruh karena terkena PHK. Singkatnya, awal tahun hingga Mei 1998, terjadi kekacauan karena keputusan pemerintah dalam memainkan harga pokok. Kenaikan BBM dan listrik yang dilakukan oleh pemerintah dianggap wajar karena beban subsidi BBM dan listrik yang terlalu besar, tetapi beberapa pihak menilai bahwa kenaikan harga BBM justru memberatkan masyarakat karena tidak dibarengi dengan kenaikan UMR dan sikap pemerintah yang masih melakukan korupsi. Sikap pemerintah dalam menangani krisis tanpa kejelasan juga mempengaruhi respon masyarakat. Harian Kompas tanggal 3 Mei 1998 juga membahas mengenai respon masyarakat yang diwakili oleh Staf Pengajar Universitas Indonesia (UI) Dra. Ani Widyani

Soetjipto. Menurutnya, kesimpangsiuran kebijakan, saling lempar tanggung jawab, serta pertanyaan yang membingungkan masyarakat, negara tetangga, dan pasar internasional, memperburuk dampak krisis moneter di Indonesia.²³

Awal Mei 1998, surat kabar dipenuhi dengan berbagai berita mengenai demonstrasi, pemogokan kerja, pencarian orang hilang, bentrokan aparat dengan mahasiswa, respon masyarakat melalui ahli, dan berbagai bentuk pernyataan keprihatinan lainnya. Akumulasi kekecewaan masyarakat yang terus menerus disampaikan lewat berbagai aksi, mencapai puncaknya pada peristiwa Trisakti, 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut diawali dengan aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan alumni. Aksi damai ini dibuka dengan mimbar bebas yang dilaksanakan di daerah parkir kampus. Sekitar pukul 13.00 WIB, mahasiswa mulai bergerak keluar kampus menuju kantor MPR di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Laju mahasiswa pada akhirnya dihentikan oleh aparat dengan alasan keamanan, setelahnya mahasiswa dialihkan untuk melanjutkan aksi damai mereka di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat. Selama proses aksi damai berjalan, terdapat sekitar 500 personil aparat yang diterjunkan untuk mengamankan aksi damai ini. Aksi damai yang dilaksanakan oleh mahasiswa Trisakti dengan mimbar bebas berlangsung hingga pukul 17.00 WIB dan berjalan dengan tenang serta mahasiswa dihibau untuk kembali ke kampus oleh aparat. Dalam suasana hujan pada sekitar pukul 17.20 WIB terdengar letusan tembakan dari arah bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat yang berjarak 300 meter dari kampus Trisakti. Mahasiswa yang panik kemudian berlarian masuk untuk berlindung di dalam kampus. Dalam kondisi chaos tersebut terdapat beberapa mahasiswa yang

²³ Anonim, "Krisis Memburuk Akibat Pernyataan SImpang Siur", (Kompas, 3 Mei, 1998), hal. 7.

dipukuli oleh aparat, dan aparat yang berjaga-jaga dengan menggunakan senapan laras panjang. Sekitar pukul 18.30 sampai 20.00 WIB, empat mahasiswa ditemukan tewas dan banyak yang mengalami luka-luka, korban dilarikan ke RS Sumber Waras.²⁴

Pasca peristiwa Trisakti yang menewaskan enam mahasiswa,²⁵ kemarahan publik terhadap rezim mulai bergeser. Fokus tidak hanya pada masalah ekonomi, melainkan bergeser pada bagaimana pemerintahan berjalan. Pergeseran fokus ini selain disebabkan oleh respon pemerintah terhadap krisis, juga disebabkan oleh represi aparat yang semakin semena-mena. Buntut dari represi aparat pada peristiwa Trisakti, beberapa kota di Indonesia khususnya Jakarta mengalami kerusuhan. Ribuan mahasiswa memadati kampus Trisakti sebagai bentuk bela sungkawa serta mengiringi tiga mahasiswa Trisakti, Elang Mulya, Hendriawan Sie yang dimakamkan di Jakarta dan Heri Hartanto, sedangkan Hafidhin Royan dimakamkan di Bandung. Pada prosesi iring-iringan ini, kemarahan masa berfokus pada cara pemerintah, terutama aparat dalam menangani kerusuhan. Timbul sebuah perasaan dimana aparat yang seharusnya mengayomi dan mengamankan demonstrasi, justru melakukan represi berlebihan hingga jatuh korban sipil. Kemarahan masa dilampiaskan melalui perusakan fasilitas umum disekitar Jalan Daan Mogot mengarah ke Mall Citraland, sedangkan yang lain menuju kearah Jalan Prof. Latumeten, Jembatan Besi, dan Bandengan. Masa yang berada di Jalan Daan Mogot, melakukan aksi protes mereka dengan membakar dan merusak toko kecil dan pom bensin yang berada di sekitaran lokasi. Mereka juga melakukan pembakaran kendaraan. Kemarahan masa meluas hingga

²⁴ Harian Kompas, 13 Mei 1998. h.7.

²⁵ *Ibid.* h. 7.

beberapa daerah di Jakarta. Bentuk bela sungkwa terhadap tragedi Trisakti juga dilakukan mahasiswa di luar Ibu Kota seperti, Solo dan Palembang, dimana imbas dari tragedi tersebut, masa melakukan pembakaran di beberapa toko. Mahasiswa di Bandung dan Yogyakarta juga melakukan aksi protesnya dengan mendesak pemerintah lokal untuk menyetujui dan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi.²⁶ Kerusuhan yang berujung kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, berakhir setelah Presiden mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Keputusan yang diambil Presiden Soeharto merupakan hasil akhir dari rentetan demonstrasi dan tuntutan untuk turun baik dari eksternal maupun internal pemerintahan. Dorongan masa dari berbagai lapisan hingga peristiwa “didudukinya” gedung DPR oleh mahasiswa, serta mundurnya menteri maupun simpatisan Soeharto menjadi faktor mayor kemunduran Soeharto sebagai Presiden.

2.3 Angin Segar Reformasi

Memasuki tahun 1990, dinamika sosial-politik Indonesia memasuki titik jenuh. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden untuk ke-6 kalinya, menunjukkan supremasinya dalam politik dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mendorong respon masyarakat untuk merefleksikan kembali arah politik dan tujuan pemerintahan Orde Baru. Gejolak politik yang demikian memunculkan sikap kritis masyarakat terhadap kehidupan politik Orde Baru yang disuarakan melalui demonstrasi. Frekuensi demo yang tinggi memicu orang awam untuk mempertanyakan siapa dan apa yang melatar belakangi aksi tersebut. Pertanyaan tersebut, membawa Yustoni Vouleentero yang kala itu merupakan

²⁶ Kartasmita Gian. Disertasi. “*Peristiwa Mei 1998 : A Study of Anti-Chinese Violence in Glodok District, West Jakarta*”. (Jakarta, FIB Universitas Indonesia, 2011) h. 54-59.

mahasiswa YKPN jurusan akuntansi untuk mencari tahu dan terjun dalam dunia aktivisme. Setelah berkuliah selama 2 tahun di YKPN, Yustoni atau sering disapa Tony, mengejar cita-citanya untuk berkuliah seni rupa dengan pindah ke ISI (Institute Seni Indonesia) atau kala itu masih menjadi ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia). Kepindahan Tony ke ASRI tidak menyurutkan niatnya untuk mengikuti dan terjun dalam dunia aktivisme. ASRI mempertemukan Tony dengan seniornya yang kebetulan juga aktif sebagai korlap (koordinasi lapangan) dan pertemuan ini memperkuat semangat Tony untuk terjun dalam praktik aktivisme. Hal tersebut juga dimanfaatkan Tony untuk masuk dalam jejaring mahasiswa yang memiliki kesamaan visi, yaitu transformasi. Kerja aktivisme tersebut menjadi landasan Tony untuk mendirikan Taring Padi.

Pertemuan Tony dengan rekan-rekannya di Taring Padi selain melalui kerja aktivisme, sering juga melalui pameran yang dilakukan secara kolektif maupun pameran tunggal Tony. Penggunaan seni sebagai medium memang bukan hal yang baru, Tony kerap melakukan panggung kolaborasi performatif antara mahasiswa FSRD (Fakultas Seni Rupa dan Design) dengan mahasiswa Teater dan panggung yang dipilih juga sering dilakukan di desa-desa. Fokus kerja seni dan aktivisme tersebutlah yang menjadi landasan Tony untuk mendirikan Taring Padi. Dalam proses pendiriannya, pemilihan gamping (gedung bekas ASRI) sebagai markas Taring Padi, memiliki nilai ekonomis, ditempat itu, anggota Taring Padi tidak perlu memikirkan uang listrik maupun air dan mereka bisa memanfaatkan lahan terbuka untuk bercocok tanam. Selain itu ruang-ruang kosong di gamping, sering dimanfaatkan sebagai panggung kolektif anggota Taring Padi dengan masyarakat sekitar, maupun organisasi masyarakat lainnya. Gamping juga sering

menjadi panggung gigs Hardcore underground yang cukup terkenal di Yogya. Daya tarik ini juga yang menjadi pondasi kuat Taring Padi untuk tumbuh dan memperluas jejaring mereka ke panggung nasional maupun internasional.

Reformasi bukanlah tanda kemenangan publik atas 32 tahun kekuasaan Orde baru. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan hanya satu bentuk kemenangan kecil publik atas 32 tahun kekuasaan otoriter Orde Baru. Taring Padi melalui karyanya mengkomunikasikan realita yang harus dihadapi dan difahami oleh masyarakat. Realita tersebut juga menyaratkan bahwa kondisi politik, sosial, dan budaya Indonesia belum 100% terbebas dari kesewenangan kaum elit. Taring Padi berusaha membangun kesadaran bersama bahwa masyarakat akar rumput masih mengalami diskriminasi berkat budaya politik borjuis yang dibangun oleh Orde Baru.

Posisi Taring Padi sebagai kelompok dalam masyarakat tidaklah netral, Taring Padi tidak netral dalam usaha yang mereka perjuangkan dan opini mereka terhadap masyarakat. Bentuk kegiatan maupun usaha yang dilakukan sangatlah politis. Taring Padi sebagai kelompok, melalui kerja seni dan aktivisme secara sadar memihak rakyat akar rumput, kelompok sosial yang dikalahkan dalam dinamika sosial-politik Orde Baru.²⁷

Mayoritas karya Taring Padi mengusung tema mengenai realita masyarakat akar rumput. Beberapa karya Taring Padi, mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap kondisi sosial politik. Karya tersebut kemudian akan dibawa dalam demonstrasi, selain sebagai bentuk visual dari tuntutan masyarakat, karya

²⁷ Representasi masyarakat ideal menurut Taring Padi terlihat dari tujuan pembentukan kelompok ini, yaitu sebagai kelompok yang bekerja untuk mentransformasi budaya populer di Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah kembalinya demokrasi kerakyatan dan posisi rakyat dalam dinamika sosial-politik di Indonesia. mmm

juga diibaratkan sebagai representasi Taring Padi dalam demonstrasi. Bentuk pendekatan artistik dipakai sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian audience sekaligus sebagai bentuk lain dari penyampaian tuntutan (tidak hanya berfokus pada bentuk lisan). Pemakaian bentuk visual dan slogan dirasa jelas sebagai pemicu refleksi pribadi *audience*²⁸ serta mempertegas pokok tuntutan yang ditujukan kepada elit. Pendekatan artistik dirasa Taring Padi sebagai sebuah bentuk pendekatan lain yang bertujuan untuk mencairkan dan “memeriahkan” suasana demo yang erat dengan nuansa tegang. Selain dengan karya lukis, Taring Padi juga kerap menggunakan seni performatif sebagai bentuk penyuaran demonstrasi.

Melalui konsep berpikir yang demikian, bentuk kegiatan Taring Padi pada periode 1999-2000 dapat dilihat dengan lebih lugas. Dalam tulisan Ugeng,²⁹ yang kemudian dikutip oleh Hendro dalam buku *Mengeja Fixer 2021*,³⁰ dengan tegas disebutkan bahwa Taring Padi merupakan kolektif dengan tendensi tertentu, yakni tendensi keberpihakan kepada masyarakat akar rumput dalam kerja kolektif dan aktivisme mereka. Pada rentetan peristiwa 1998-2000, dapat dilihat bahwa gejolak yang terjadi di masyarakat akar rumput adalah sebuah “riak besar” yang disebabkan oleh gejolak pada tingkatan atas (pemerintah). Reformasi sendiri merupakan harapan baru untuk melihat sebuah bentuk demokrasi yang berpihak kepada rakyat. Selian itu hadiah besar yang diterima masyarakat adalah kebebasan. Pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi kepada masyarakat yang

²⁸ Sugiharto Bambang. “*Untuk Apa Seni ?*”. Matahari. Bandung. 2013. h. 63

²⁹ Darmawan Ade, Ugeng T. Moetidjo. *Publik, Guna, dan Akalcara, Tidak Terkadang : Bertempatlah itu dalam Seni Rupa*. Vol 1, Jurnal Karbon, Keindahan Lawan Keszamanan. 11/2000

³⁰ Adin, Ajeng Nurul Aini, Aries Syarifuddin, dkk. “*Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolektif Seni Indoneisa dalam Sepuluh Tahun Terakhir*”. Yayasan Gudskul Studi Kolektif. Jakarta. 2021. h. 104-122.

menyuarakan kritik mereka di depan publik. Momen ini dimanfaatkan Taring Padi sebagai kesempatan untuk menyuarakan realitas bahwa kemenangan ini belum 100% dan perjuangan untuk mengembalikan budaya kerakyatan masih panjang.

Untuk mencapai demokrasi kerakyatan, Taring Padi dalam kerja seninya mengkomunikasikan realita akar rumput kepada masyarakat yang lebih luas, melalui karya mereka. Realita tersebut digambarkan melalui permainan tokoh dalam karya Taring Padi, dimana rakyat digambarkan sebagai sosok yang diidealkan sebagai “pahlawan baik” yang menghukum pemerintah dengan penggambaran sebagai penjahat. Konsep ini terlihat di sebagian besar karya Taring Padi, terutama pada karya yang lahir di era awal reformasi. Pada beberapa karya lain rakyat digambarkan memiliki kesempatan untuk melawan balik atau menghukum elit. Selain mengkomunikasikan demokrasi proletar melalui karya, Taring Padi juga melakukan kerja kolektif bersama organisasi lain yang memiliki kesamaan visi.

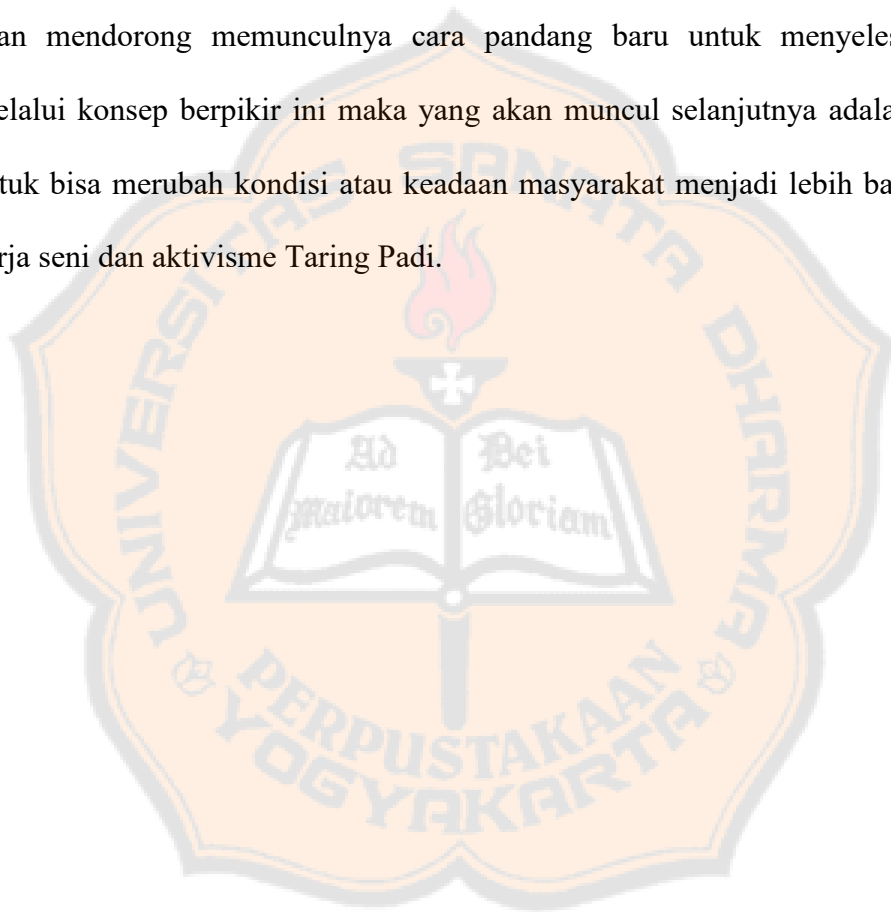
Permasalahan SARA, kepentingan, dan bentrokan antar kelompok masyarakat menempati posisi teratas dari gejolak masyarakat pada periode 1998-2000. Kondisi yang demikian mendorong Taring Padi sebagai kolektif untuk hadir sebagai “peredda”.³¹ Didasarkan pada komitmen untuk menciptakan budaya masyarakat yang demokratis, maka kegiatan aktivisme dijalankan secara kolektif. Perlu diingat kembali bahwa fungsi seni adalah sebagai medium refleksi, pembuatan alternatif cara berpikir dan menciptakan kemungkinan baru.³² Dilihat

³¹ Mengacu pada fungsi seni yaitu sebagai media reflektif, karya Taring Padi melalui slogan dan himbauan yang tertuang dalam hasil kerja mereka dapat terlihat bagaimana Taring Padi berusaha menenagkan keadaan masyarakat yang sedaang kisruh, terutama pasca reformasi, melalui slogan untuk menjaga kedamaian, pluralisme, dan saling menerima perbedaan.

³² Sugiharto Bambang. “*Untuk Apa Seni ?*”. Matahari. Bandung. 2013. h. 22-23.

dengan lebih sederhana, Taring Padi dalam kerja praktik seni dan aktivisme berusaha untuk menciptakan harapan akan suatu bentuk masyarakat yang lebih baik.

Proses pembangunan harapan diatas bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk kontra hegemoni dengan menghadirkan antitesis pada nilai-nilai dominan yang menindas. Pemahaman terhadap permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat akan mendorong memunculnya cara pandang baru untuk menyelesaikannya. Melalui konsep berpikir ini maka yang akan muncul selanjutnya adalah harapan untuk bisa merubah kondisi atau keadaan masyarakat menjadi lebih baik melalui kerja seni dan aktivisme Taring Padi.



BAB III

KETERLIBATAN TARING PADI DALAM DINAMIKA

SOSIAL-POLITIK

1999-2000

3.1 Haluan Kerja Taring Padi

Reformasi kerap disandingkan dengan situasi bebas yang memungkinkan masyarakat melakukan kehendaknya dengan leluasa. Kontrol pemerintah terhadap masyarakat mengalami penurunan dan berdampak pada kelonggaran seniman untuk berekspresi. Mereka tak harus lagi mengajukan izin untuk melaksanakan pameran atau pentas seni secara formal dan bahkan seiring berjalannya waktu, urusan izin ini hanya dianggap sebagai formalitas saja.¹ Ledakan ekspresi seniman merupakan satu bentuk luapan emosi mereka terhadap realitas kehidupan Orde Baru yang hanya berpihak pada kelompok borjuis. Karya pasca Orde Baru mendapat banyak inspirasi dari kehidupan elit Indonesia sehingga pemakaian tema mengenai politik akan sering dijumpai pada masa transisi ini.² Pagelaran seni dengan tema parodi kehidupan elit, korupsi, pengusaha yang hanya mementingkan perutnya sendiri, kehidupan muram masyarakat yang dicitrakan sebagai “korban” Orde Baru serta rezim militer yang jahat, menjadi sorotan dari seniman. Eksplorasi ide yang didorong melalui kebebasan berekspresi serta menurunnya kontrol elit dalam ranah budaya, memunculkan bentuk ekspresi seni baru yang berfokus pada “kekerasan struktural” oleh elit.

¹ Arbuckle Heidi G. *“Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia”*. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 57

² *Ibid.* h. 89

Pada masa transisi Fokus penyampaian karya tidak hanya berkuat pada ruang seni konvensional (galeri, teater, dll) tetapi terjadi pergeseran ke ruang pameran konvensional yaitu ruang publik. Pemilihan arena publik (tembok-tembok jalanan) sebagai ruang pameran Taring Padi, berkaitan dengan pandangan yang menilai bahwa galeri kerap mengeksklusifkan diri sebagai tempat prestis. Dalam kacamata kelompok, galeri hanya berbicara mengenai kepentingan pribadi serta adanya ketakutan bahwa wacana seni dan aktivisme Taring Padi akan diabstraksikan ulang.³ Selain itu, akses untuk memasuki galeri atau bahkan menilai ruang pameran konvensional, hanya diberikan pada kelompok seni yang menilai seni sebagai seni (estetika, dan bukan praktik langsung pada masyarakat). Penolakan paham seni untuk seni memang kerap di suarakan Taring Padi, dengan tujuan agar seniman yang menghasilkan karya melalui refleksi sosial tidak melupakan elemen praktik dalam kerja seni mereka.⁴ Pemilihan ruang publik sebagai arena pameran menjadi opsi Taring Padi dalam menjaga idealisme kelompok serta bertujuan untuk bersinggungan langsung dengan audience. Penempatan karya pada ruang publik mendorong munculnya reaksi masyarakat, baik setuju maupun tidak.

Dasar kerja seni Taring Padi terletak pada usaha mereka untuk melakukan transformasi bagi masyarakat akar rumput. Dengan artian, memunculkan sebuah perubahan dimana masyarakat yang terpinggirkan dan selalu dikalahkan oleh politik dominan, mampu direpresentasikan dan menghadirkan perubahan “nasib”.⁵

³ Prasisco Yongki Gigih. “*Seni Nirmanusia : Seluk Estetika Postmodern Jean-Francois Lyotard*”. Bantul. Ladang Kata. 2016. h. 27

⁴ Arbuckle Heidi G. “*Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia*”. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 17-18

⁵ Dalam perilsan buku “Mengeja F1xer 2021” terdapat sesi diskusi pra rilis yang saya lihat kemabali pada 10 Septermber 2022 yang menjelaskan mengenai haliuan aktivisme Indonesia. Pada

Pengertian tersebut tidak serta merta diartikan bahwa Taring Padi benar-benar bekerja untuk langsung merubah apa yang terjadi di masyarakat akar rumput. Kerja seni Taring Padi yang dibungkus dengan aktivisme bertujuan untuk mengadvokasi permasalahan aktual masyarakat melalui kerja artistik. Perubahan yang diharapkan oleh Taring Padi dapat dicapai melalui meningkatnya kesadaran publik terhadap permasalahan dengan tujuan akhir yaitu di desaknya elit melalui *people power* untuk mencapai perubahan sosial.

Kerja transformatif Taring Padi didasarkan pada bentuk kerja artistik dan aktivisme berbasis masyarakat akar rumput. Kerja ini dilakukan melalui pemahaman terhadap permasalahan masyarakat akar rumput melalui diskusi dan observasi langsung kelompok dengan masyarakat.⁶ Setelahnya hasil tersebut akan didiskusikan kembali dengan forum yang lebih besar terdiri dari anggota kelompok, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat terkait. Pembahasan tersebut meliputi pemilihan fokus tuntutan, metode yang akan dilakukan, setelahnya kelompok akan mengeksekusi hasil pembahasan.

Bentuk kerja Taring Padi bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial karena konsistensi mereka terhadap menjaga perlawanan dengan elit.⁷ Bentuk kerja ini diambil sebagai respon terhadap keadaan sosial-politik masyarakat pada masa transisi Orde Baru ke reformasi. Penggunaan label gerakan sosial juga tidak dianggap berlebihan, terlebih bentuk kerja Taring Padi yang memihak masyarakat

sesi pembahasan “kreativitas Tanpa Nama Aktivisme dan Kolektivisme” penulis serta pembicara Hendro Wiyanto dan Ugeng Moetidjo membahas mengenai fungsi aktivisme pada medan sosial. Pada diskusi tersebut, Ugeng membahas bagaimana aktivisme pasca reformasi (salah satunya Taring Padi) melakukan kerja transformatif melalui kerja aktivisme mereka. Pembahasan ini kemudian mengarah pada keterbukaan seni sebagai medium untuk menyuarakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat akar rumput untuk mengambil perhatian publik.

⁶ Adin, Ajeng Nurul Aini, dkk. “*Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolektif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir*”. Jakarta. Yayasan Gudskul Studio Kolektif. 2021. h. 151- 153

⁷ Suharko. “Gerakan Sosial Baru di Indonesia : Repertoar Gerakan Petani”. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol 10, 1 Juli 2006. h. 5-6

akar rumput. Keberpihakan Taring Padi dianggap sebagai bentuk usaha mereka untuk menciptakan perubahan realita dalam kehidupan sosial-politik, terutama bagi masyarakat akar rumput yang kerap menjadi korban politik dominan.

Taring Padi sebagai gerakan sosial melakukan tugas transformasi mereka dengan beberapa pertimbangan, yaitu kerja organisasi, strategi, dan daya tahan.⁸ Pembentukan organisasi dirasa menjadikan kelompok lebih mudah untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, sehingga kerja kolektif yang kerap dilakukan Taring Padi bisa berjalan lebih efektif. Pengorganisasian akan menjadi lebih efektif jika dibarengi dengan strategi yang baik. Dengan melakukan pertimbangan dalam tiap aksinya, tuntutan Taring Padi diharapkan lebih terdengar. Hal ini berkaitan dengan pemilihan medium kerja apakah yang akan digunakan seperti, wayang kardus yang dibarengi dengan demonstrasi, atau bergerak secara perlahan dengan menggunakan poster, atau menggunakan banner untuk menangkap audience yang lebih luas, dll.⁹ Strategi dianggap sebagai point penting dalam gerakan sosial agar tujuan bersama bisa dipenuhi. Taring Padi sebagai gerakan sosial, teruji melalui konsistensi mereka melawan common enemies atau musuh bersama.¹⁰ Menjaga perlawanan dengan musuh bersama merupakan taktik gerakan sosial untuk menjaga militansi anggota dan bertujuan untuk mengikat kelompok. Musuh bersama pada pembahasan ini adalah elit politik yang berusaha membangun demokrasi borjuis.

Untuk menjaga permusuhan Taring Padi menggunakan pendekatan artistik sebagai bahasa politik mereka. Penggunaan wayang kardus, poster, banner,

⁸ Suharko, gerakan sosial di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 10, No 1. Juli 2006. h. 4

⁹ Catatan penulis, Diskusi Tatakelola Fest #4, 10 Oktober 2022, di ISI Yogyakarta

¹⁰ Suharko. *Opct. cit* h. 4.

booklet, dsb, merupakan bentuk dari strategi Taring Padi dalam menyuarakan kegelisahan mereka.¹¹ Meresponi kondisi sosial-politik pada era transisi (1997-2000), Taring Padi menyadari bahwa poin penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah pemahaman akan realitas sosial masyarakat dan memberikan edukasi politik melalui pendekatan artistik. Hal ini tertuang pada cara kerja Taring Padi yang selalu diawali dengan observasi lapangan untuk mendapatkan realitas yang ingin mereka wakikan.¹² Kemudian dilanjutkan pada diskusi dengan tujuan untuk membahas tema karya, dalam proses ini anggota akan membagikan pengalaman pribadi mereka selama proses observasi. Dalam proses ini, diskusi tidak hanya dilakukan oleh anggota Taring Padi saja, melainkan terdapat juga perwakilan dari beberapa organisasi lain, baik mahasiswa, aktivis, masyarakat, atau pun organisasi terkait. Taring Padi dalam menjalankan peran mereka sebagai kontra dari keadaan dominan (sosial-politik), menggunakan pendekatan praktis yang mengharuskan mereka selain terjun langsung untuk mempelajari permasalahan masyarakat, juga ikut berjuang atau melawan permasalahan tersebut bersama masyarakat seperti, melakukan demonstrasi, panggung kesenian, menginisiasi protes seperti, land reform imbas dari reformasi hijau yang merusak tanah. Pendekatan yang demikian dilakukan karena Taring Padi menyadari posisi mereka sebagai kelompok masyarakat yang memiliki power atau kekuatan untuk “memberikan perasaan tidak aman” kepada elit melalui pendekatan artistik dan

¹¹ Benedict Anderson dalam buku “Kuasa Kata : Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia” pada bab v, menggambarkan bagaimana media masa bisa menjadi kekuatan politik. Anderson berfokus pada bentuk-bentuk kartun dan slogan yang berkembang di Indonesia dari tahun 194 hingga masa Orde Baru. Dalam pembahasan ini, fokus Anderson terletak pada penggunaan media kartun sebagai bahasa politik, terutama pada pemerintahan Orde Baru.

¹² Bentuk pendekatan melalui partisipasi kelompok dengan masyarakat kerap dinilai sama dengan cara organisasi pendahulu mereka Lekra dalam bekerja. Taring Padi menyebut observasi partisipatoris ini sebagai *live in* dan hal tersebut cukup dekat dengan model kerja Lekra yang disebut turba atau turun bawah.

aktivisme mereka.¹³ Sehingga melalui desakan-desakan kecil, akan mendorong munculnya transformasi.

Dalam usaha untuk tetap bermain aman, Taring Padi kerap menyembunyikan “target” kemarahan mereka dalam simbol-simbol tertentu.¹⁴ Permainan ikon atau simbol selain digunakan untuk menyamakan “target”, juga dipakai sebagai bentuk sarkas kepada “target”. Selayaknya penyimbolan cicak vs boyo atau cicak melawan buaya untuk menggambarkan masyarakat melawan koruptor, Taring Padi juga menggunakan penyimbolan seperti asu, curut, dan celeng atau anjing, tikus, dan babi untuk menggambarkan lawan mereka, yaitu elit dan militer.¹⁵ Selain digunakan untuk menyimbolkan penggunaan simbol juga sebagai satu ungkapan kecewa masyarakat terhadap elit.

3.2 Kerja Seni Taring Padi

Kerja seni dan aktivisme Taring Padi meliputi kerja visual dengan hasil wayang kardus, poster, banner, dan booklet. Proses pengerjaan karya visual dilakukan secara kolektif maupun mandiri. Pengerjaan karya masif seperti banner akan dieksekusi oleh anggota kelompok secara kolektif. Anggota kelompok yang sudah berpengalaman akan mengerjakan sketsa besar dan detailing, lalu anggota kelompok lain akan mengerjakan bagian pewarnaan dengan bantuan dari anggota

¹³ Laksana Ben C. “Pendidikan Demokrasi untuk Semua”. Pribadi. 2021. h. 28.

¹⁴ Dalam tulisan IVAA (Indonesia Visual Art Archive) mengikuti publikasi buku Taring Padi “Seni Membongkar Tirani” (2010) menuliskan sebuah makalah *unpublished* yang membahas dinamika seni dari tahun 1970-1990. Pada pembahasan periode Orde Baru, IVAA mengutip tulisan FX Harsono “Kerakyatan dalam Seni Lukis Indonesia” yang berbicara mengenai sensor subyek permasalahan guna mengamankan diri dari sikap kontrol Orde Baru.

¹⁵ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. “*Taring Padi : Seni Membongkar Tirani*”. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 36

lain, sehingga dalam pengerjaan karya tiap anggota akan merasakan pengalaman yang sama.¹⁶



Gambar 1. Proses produksi poster Taring Padi.

Hasil kerja seni selanjutnya adalah wayang kardus dan kerap dijumpai pada demonstrasi yang diikuti oleh Taring Padi. Pengerjaan wayang kardus biasanya dilakukan secara individu dengan merespon tema besar yang diberikan seperti, militerisme, buruh, kesetaraan kelas, SARA, HAM, dan isu 65.¹⁷ Hasil pengerjaan karya ini dirasa lebih personal dan reflektif karena menyangkut pandangan individu terhadap lingkungan mereka. Poster yang dikerjakan oleh Taring Padi secara siklus pengerjaan hampir sama dengan produksi banner. Dengan meresponi tema dan permasalahan, anggota kelompok akan mengerjakan poster secara individu dengan menggunakan teknik wood cutting yang kemudian akan di-print bersama-sama. Taring Padi juga menjual poster yang sudah mereka buat dengan tujuan untuk mengisi kas organisasi. Booklet atau panggilan

¹⁶ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. *“Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”*. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 46

¹⁷ Dikutip dari seminar pertanggung jawaban Taring Padi dalam Tata Kelola Fest #4 pada 10 oktober 2022 yang diisi oleh manager artistik Taring Padi Ladija Triana Dewi. Dalam seminar ini, pembicara juga menjelaskan sistem kerja artistik Taring Padi dari hulu ke hilir, terutama kerja artistik mereka di Documenta Fifteen.

popularnya zine merupakan karya Taring Padi dalam bentuk buku kecil seukuran buku tulis yang memuat gambar, lagu, puisi, komik, cerita pendek yang dikerjakan oleh anggota Taring Padi maupun titipan dari pihak luar. Booklet digunakan sebagai medium yang lebih fleksibel dalam mengkomunikasikan tuntutan Taring Padi kepada masyarakat. Booklet ini dikenal dengan nama Terompet Rakyat yang dibuat setiap bulannya dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat atau organisasi lain. Penggunaan media ini dalam strategi Taring Padi merupakan sebuah bentuk propaganda terselubung kelompok dalam mengkomunikasikan permasalahan, kritik, dan mengedukasi masyarakat.¹⁸

Kerja seni Taring Padi pada tahun 1999-2000 bisa dilihat dalam beberapa bentuk antara lain, demonstrasi, workshop atau lokakarya, dan kerja bersama organisasi lain. Demonstrasi menjadi bentuk kerja Taring Padi yang paling dominan karena persentase keikutsertaan kelompok yang cukup tinggi dalam setiap demonstrasi. Kerja sama dengan organisasi lain dilakukan Taring Padi dengan tujuan untuk meningkatkan kerja organisasi dan memperluas jaringan.¹⁹ Konsep kerja sama ini bisa dirangkul juga melalui kerja aktivisme. Pada tahun pertama Taring Padi berdiri, terdapat beberapa kerja sama dengan beberapa organisasi maupun kolektif baik internasional maupun nasional.

Dalam melihat karya Taring Padi terdapat beberapa ciri yang menjadi karakteristik dari karya Taring Padi. Karakter tersebut melekat pada hasil karya Taring Padi, baik pada wayang kardus, poster, banner, booklet, maupun hasil karya lainnya. Karya Taring Padi memiliki karakter realis yang tegas serta gaya penyampaian lugas dan kerap berbentuk satir. Walaupun tidak semua karya

¹⁸ Arbuckle Heidi G. *"Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia"*. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 91-92.

¹⁹ *Ibid.* h. 104

Taring Padi bernuansa satir, tergantung tujuan pembuatan karya. Dalam beberapa kasus, gaya bahasa yang digunakan oleh Taring Padi lebih condong pada gaya bahasa humanis, seperti pada seri poster untuk permasalahan SARA tahun 2000 serta karya mereka menjelang pemilu 1999. Pemakaian gaya realis juga dinilai bertujuan untuk memperjelas maksud dari karya. Taring Padi dalam karyanya juga kerap memainkan peran buruh atau petani²⁰ sebagai kelompok yang memiliki kekuatan untuk “mengadili” kelompok elit. Digambarkan sebagai kelompok yang kuat dengan garis tegas dan bentuk fisik yang kuat, kelompok buruh mengambil peran sebagai hakim untuk kinerja buruk serta sikap tidak humanis yang dilakukan Orde Baru melalui aparatnya. Terbalik dari gambaran buruh yang digambarkan sebagai kelompok yang kuat, kelompok elit digambarkan sebagai sosok yang malas dan suka main perintah melalui gestur serta bentuk fisik yang buncit dan tidak jarang dalam beberapa karya untuk mewakili kelompok elit, kepala mereka diganti menjadi kepala hewan.

Mayoritas tema karya Taring Padi berbicara mengenai perlawanan antar kelas proletar dengan borjuis, dengan pokok bahasan yang berfokus pada sila ke-5 yaitu, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal tersebut mendorong Taring Padi untuk terus mengkomunikasikan realita sosial melalui karya dan politis dalam kerja aktivisme mereka. Selain berfokus pada urusan politik, isu sosial juga menjadi fokus Taring Padi. Fokus tersebut dilandaskan pada keberpihakan Taring Padi serta keinginan mereka untuk berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan isu sosial, Taring Padi masih

²⁰ Pengambilan buruh dan petani sebagai tokoh disini didasarkan pada fakta bahwa semasa pemerintahan Orde Baru, buruh dan petani kerap mengalami diskriminasi kelas, terutama posisi mereka dalam kelas sosial yang cukup sepele (dalam kacamata elit).

memegang tujuan mereka dalam menyebarkan kesadaran umum yang berujung pada peningkatan kesadaran umum terhadap masalah masyarakat akar rumput.

3.2.1. Wayang kardus

Wayang kardus kerap menjadi atribut Taring Padi, maupun aktivis ketika demo. Terbuat dari kardus bekas dengan penopang bambu serta ilustrasi dan slogan yang berisi tuntutan demonstran, menjadikan wayang kardus atribut demo yang cukup atraktif. Diruntut dari fungsinya, selain difungsikan untuk memperjelas tuntutan, wayang kardus memiliki nilai praktis, yaitu melindungi demonstran dari panas serta lemparan batu atau benda lainnya saat demonstrasi berubah *chaos*.²¹ Hasil kerja artistik Taring Padi ini menjadi salah satu unggulan bagi Taring Padi, karena pengerjaannya yang mudah, serta dapat dilakukan oleh pemula sekalipun. Wayang kardus identik dengan tema permasalahan yang berfokus pada lokalitas, maupun refleksi personal terhadap lingkungan. Wayang kardus digunakan untuk membicarakan permasalahan yang lebih personal. Selain dengan medium banner untuk permasalahan yang lebih general, wayang kardus dipakai sebagai medium refleksi individu dalam tiap aksi, sehingga slogan yang diciptakan akan beraneka ragam, tetapi mencangkup satu tema besar. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Orde Baru dan kesewenangan aparat menjadi topik yang cukup sering di bahas pada tahun 1998.

²¹ Dikutip dari film Dokumenter Taring Padi “Indonesia Art Activism & Rock n Roll” yang diproduksi pada tahun 2002 yang diproduksi oleh Charlie Hill-Smith, Jamie Nicolai, dkk. Melalui House of the Red Monkey, Sydney, Australia. Pembuatan dokumenter ini bertujuan untuk melihat perkembangan seni kontemporer di Asia Tenggara pada awal tahun 2000. studi yang dilakukan juga merupakan sebuah bagian dari geliat akademis, terutama pada karya dengan tema resistensi politik serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.



Gambar 2. Wayang kardus anti militerisme

Demonstrasi kerap mengusung tema mengadili Soeharto dan kroninya, terutama peran militer dalam politik yang dirasa tidak netral. Sayangnya banyak karya Taring Padi, yang dibakar atau rusak selama masa pemakaian dan mayoritas pengrusakan dilakukan oleh kelompok pro elit yang merasa terganggu oleh adanya Taring Padi. Sehingga untuk karya dari tahun 1998-2000 cukup sulit ditemukan, serta minimnya dokumentasi pada era tersebut.²²

3.2.2. Poster

Pengerjaan poster yang dilakukan oleh Taring Padi secara kolektif dengan merespon tema tertentu. Pada konteks revormasi, tema yang dibawa oleh Taring Padi banyak berbicara mengenai menjaga kerukunan, saling menjaga dan menghormati antar sesama, solidaritas, serta beberapa tema mengenai kesenjangan buruh atau tuntutan masyarakat terhadap Orde Baru

²² Seminar Kelola Fest #4 pada 10 Oktober 2022

yang baru saja tumbang.²³ Reformasi mendorong pemerintahan untuk menentukan jajaran politik yang baru. Pada masa ini, kebebasan direfleksikan secara berbeda tiap individu dan tak jarang terjadi gesekan antar kelompok, terutama menjelang pemilu pada juni 1999. Sentimen etnis dan agama belum sepenuhnya surut, sehingga masih banyak konflik masyarakat dengan mengatasnamakan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan). Mendapati kenyataan lapangan yang demikian, Taring Padi meresponinya dengan mengeluarkan seri poster cukup kayu pada bulan Maret sampai Juni 1999.²⁴ Peluncuran seri poster ini merupakan sikap Taring Padi dalam menjalankan tugasnya dalam kontrol sosial melalui hasil kerja seni mereka. Hasil kerja tersebut jika dilihat dari reaksi dan fungsinya, bisa disejajarkan sebagai media masa. Produksi karya yang mengedepankan wacana humanis dalam kondisi sosial yang panas diharapkan mampu memberikan pandangan praktis, bahwa kekerasan dan konflik tidak akan pernah menjadi jalan keluar. Meresponi kondisi tersebut, Taring Padi memproduksi 10.000 copy poster yang disebar di beberapa kota Indonesia, antara lain: Yogyakarta, Solo, Semarang, Temanggung, Surabaya, Lumajang, Jakarta, Bandung, Padang, Bukit Tinggi dan Ujung Pandang.²⁵

Kondisi *chaos* ternyata masih berlangsung pada tahun 2000, tepatnya pada konflik yang terjadi di Ambon. Konflik yang didasarkan pada gesekan antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan transmigran pedagang Bugis dan Jawa yang mayoritas Islam. Puncak konflik ini adalah

²³ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. "Taring Padi : Seni Membongkar Tirani". Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 35

²⁴ *Ibid.* h. 89

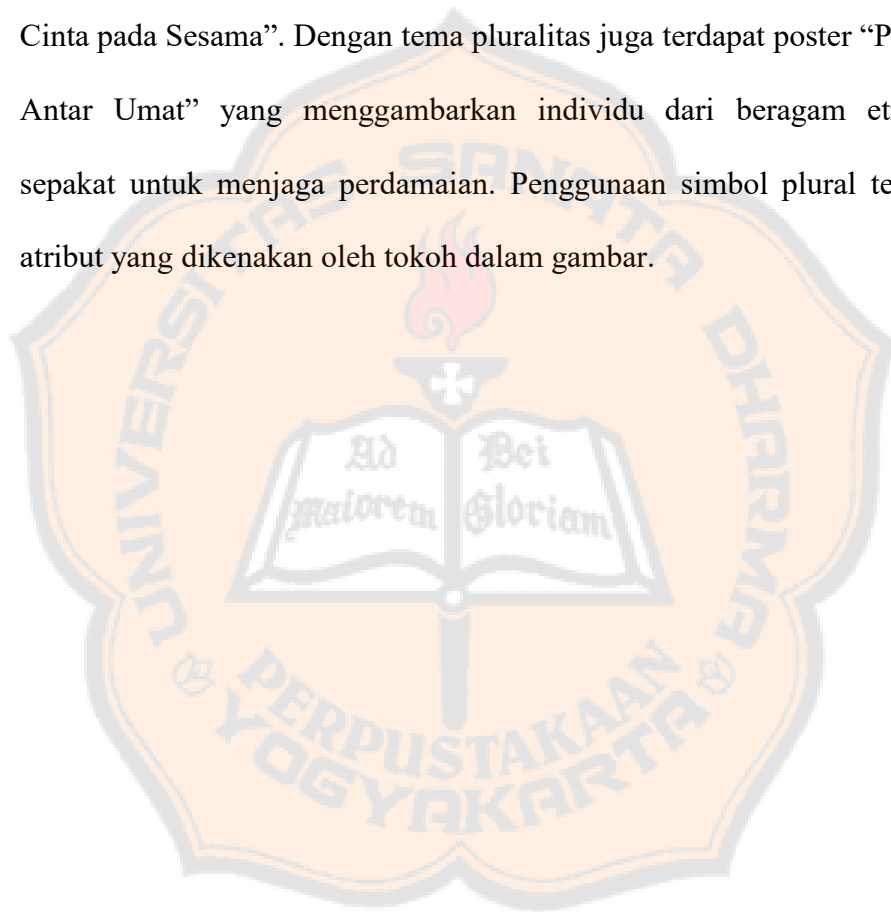
²⁵ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. "Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu". Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 47-50

pembantaian di sebuah pesantren di Desa Sintuwulemba. Serangan ini didasarkan pada penyerangan yang terjadi sebelumnya oleh kelompok Islam. Konflik yang diawali oleh kesalahpahaman kemudian berkembang menjadi munculnya sentimen antar kelompok dan berakhir pada konflik berkepanjangan. Kondisi sosial-politik pasca Orde Baru memang tidak langsung mengalami perubahan drastis ke arah yang lebih baik. Konflik dan gesekan masih kerap terjadi pada masa transisi ini. Pokok permasalahan yang terjadi di Poso secara garis besar tidak terlalu jauh berbeda dengan konflik yang terjadi pada pra pemilu 1999. Penciptaan keharmonisan, saling sadar diri untuk menjaga satu dengan yang lain dan menghormati keberagaman dinilai sebagai jalan keluar yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Menanggapi hal tersebut, Taring Padi bekerjasama dengan Lembaga Studi Pers Pembangunan (LSPP) Jakarta, untuk mencetak ulang seri poster cukil kayu sebanyak 1.000 lembar.

Dalam pembuatan seri poster tersebut, gaya yang dipakai oleh Taring Padi cukup berbeda dari karya mereka sebelumnya. Jika karya Taring Padi kerap mengakomodir wacana perlawanan, dalam seri ini pendekatan yang dipakai oleh kelompok lebih humanis.²⁶ Pengolahan slogan dengan kalimat himbauan persuasif yang didasarkan pada rasa keprihatinan dengan kondisi masyarakat di Poso. Slogan persuasif Taring Padi merupakan sebuah bentuk seruan alternatif dari keteraturan sosial semu oleh Orde Baru. Sebuah realita yang muncul ketika nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi bertumbuh melekat dengan politik. Hal tersebut menyebabkan runtuhnya nilai-nilai tersebut

²⁶ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. *"Taring Padi : Seni Membongkar Tirani"*. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 97

berbarengan dengan politik yang menjadi tonggak utama penopangnya.²⁷ Taring padi melalui seri poster ini berusaha membangun pemahaman umum untuk menciptakan kedamaian sosial yang utuh. Selain menggunakan slogan yang berisi himbauan atau refleksi, secara visual seri poster ini memiliki keselarasan dengan slogan yang dituliskan. Nilai-nilai pluralisme ditampilkan melalui penggunaan simbol-simbol agama, yang tampak pada poster “Berikan Cinta pada Sesama”. Dengan tema pluralitas juga terdapat poster “Perdamaian Antar Umat” yang menggambarkan individu dari beragam etnis saling sepakat untuk menjaga perdamaian. Penggunaan simbol plural terlihat dari atribut yang dikenakan oleh tokoh dalam gambar.



²⁷ Rajab Budi. “Negara Orde Baru : Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh”. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 6, no 3, November 2004. h. 182.



Gambar 3. Seri poster yang dibuat sebagai respon terhadap kondisi masyarakat menjelang pemilu 1999 dan konflik Ambon 2000. Didapat dari pameran 25 tahun reformasi yang diinisiasi oleh Cemeti Institute, April 2023.

3.2.3. Banner

Penggunaan banner sebagai media akan dipilih jika urgensi kelompok dalam menyampaikan tuntutan secara strategis memerlukan atensi dari khalayak. Penggunaan banner dengan penempatan pada ruang publik memang ditujukan untuk menarik perhatian baik masyarakat awam, mahasiswa, aktivis, akademisi, dsb dengan tujuan akhir untuk menyebarkan kesadaran. Penciptaan karya dengan medium banner memang tidak lebih sederhana daripada pembuatan poster. Anggota akan bekerja secara kolektif sesuai dengan tugas masing-masing, mulai dari pembuatan sketsa, *outlining*, *coloring*, dan *detailing* dikerjakan secara bergantian. Pembuatan karya tetap diawali dengan diskusi dan pembahasan permasalahan serta pengajuan sketsa yang akan dipakai.²⁸ Pengolahan wacana tidak terlalu banyak berubah antar medium, tetapi karakter yang sering dipakai dalam medium banner adalah adanya narasi yang tercipta dari visual maupun slogan.

Menjelang pemilu Juni 1999, Taring Padi melakukan kritik terhadap sikap nepotisme yang masih dilaksanakan pada praktik politik pasca Orde Baru. Kritik tersebut disampaikan melalui karya banner dengan ukuran 3m x 3m dengan judul “38 Kursi Gratis” dan “Sidang Rakyat” yang dipasang di jalan Malioboro, tepatnya di depan gedung DPR DIY dan di depan Malioboro Mall. Seri karya banner ini ditujukan kepada ABRI yang kala itu masih memiliki kursi di DPR dan MPR.²⁹ Masyarakat menilai bahwa dwifungsi serta partisipasi ABRI dalam pemerintahan justru menciderai demokrasi.

²⁸ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. “*Taring Padi : Seni Membongkar Tirani*”. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 25

²⁹ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. “*Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu*”. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 107

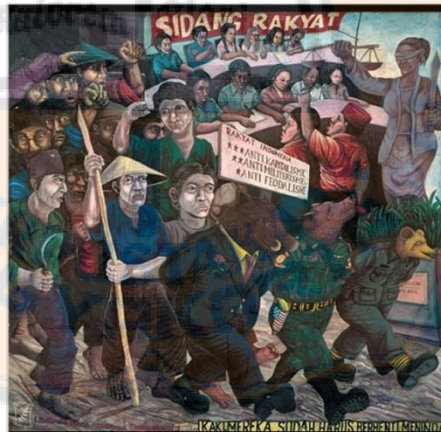
Represi yang dilakukan oleh ABRI juga sudah tidak sejalan dengan sikap demokrasi yang menjunjung musyawarah dan justru terkesan otoriter.³⁰ Protes ini digambarkan dengan menyimbolkan ABRI sebagai babi/*celeng* yang sedang dikurung dan diarak oleh masyarakat akar rumput. Tujuan dan pesan yang diharapkan oleh Taring Padi juga terpampang dengan jelas melalui slogan “Hapuskan 38 Kursi Gratis DPR/MPR”. Selain itu, pada bagian belang, cukup kecil juga terdapat tulisan “Demokrasi Sejati Adalah Tanpa Militer” sebuah slogan yang jelas-jelas menolak keberadaan ABRI dalam politik praktis. Peran ABRI sebagai alat kontrol sosial pemerintah, justru menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah pusat. Dwifungsi ABRI secara historis memang memiliki peran yang penting, seperti penyelesaian konflik yang mengancam keamanan nasional, alat kontrol sosial, dll, tetapi kedekatannya dengan Pemerintah pusat justru menjadikan ABRI melepaskan keberpihakannya pada rakyat dan mendukung wacana demokrasi ala elit. Ketidaksetujuan tersebut dapat dilihat dari banner kedua dengan tema “Sidang Rakyat”. Elit yang digambarkan sebagai hewan, diikat, diarak dan diadili oleh masyarakat. Pada bagian latar belakang, terdapat sidang yang dilakukan oleh rakyat. *Point of interest* yang menangkap mata saya adalah penggambaran wanita dengan kebaya sebagai simbol keadilan yang hampir sama dengan dewi keadilan Artemis. Secara tidak langsung, Taring Padi ingin mengkomunikasikan bahwa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat adalah sikap keadilan selayaknya seorang ibu. Permainan wacana pada banner ini terdapat beberapa point dan terasa lebih agresif. Slogan dengan olah bahasa

³⁰ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. “*Taring Padi : Seni Membongkar Tirani*”. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 44.

penolakan seperti “Rakyat Indonesia anti kapitalisme, anti militerisme, dan anti feodalisme”, kekuatan yang ditakutkan akan mengancam demokrasi rakyat. Pada bagian bawah juga terdapat slogan yang berbunyi “kaki mereka sudah harus berhenti menindas” sebuah seruan langsung yang mengisyaratkan perlawanan terhadap kelompok elit.



Gambar 4 dan 5. Banner “38 kursi gratis” dipasang di depan kantor DPRD Yogyakarta pada tahun 1999



Gambar 6. Banner “Sidang Rakyat” yang masih satu seri dengan banner “38 kursi gratis”.

Selain meresponi persiapan pemilu dan permasalahan SARA, pada tahun 1999 Taring Padi bekerja sama dengan Komnas Perempuan dalam acara “Malam Solidaritas Pengungsi Aceh” membuat seri banner dengan judul pengungsi #1 dan #2. Pembuatan seri banner ini memang tidak murni

inisiatif Taring Padi, melainkan ada dukungan serta campur tangan Komnas Perempuan dan pembuatan karya titipan seperti ini memang cukup sering didapatkan oleh Taring Padi.³¹

Dalam seri banner ini, Taring Padi mengkomunikasikan derita masyarakat Aceh, terutama perempuan dalam menghadapi gesekan kelompok pada saat itu. Gesekan kelompok antara masyarakat dengan TNI dikenal dengan nama peristiwa Simpang KKA atau dikenal dengan Kertas Kraft Aceh. Peristiwa ini berawal dari hilangnya anggota Detasemen Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkon bernama Adityawarman diduga hilang karena diculik pada peringatan 1 Muharam di Dusun Uleetutu, Desa Lancang Barat Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Merespon kejadian tersebut, TNI melakukan penyisiran di dusun dengan bentuk interogasi yang disertai dengan kekerasan. Penyisiran dan pencarian tersebut dilakukan selama dua hari pada tanggal 2 dan 3 Mei 1999. Pada tanggal dua, ketika pencarian tidak membuahkan hasil, terjadilah kesepakatan antara TNI dengan warga, bahwa penyisiran yang dilakukan TNI harus didampingi oleh Muspika (Camat, Keramil dan Majelis Permusyawaratan Ulama). Konflik memuncak di tanggal tiga, karena ketika TNI akan melakukan penyisiran tidak didampingi oleh Muspika dan hal tersebut dinilai oleh warga sebagai pelanggaran perjanjian. Respon dari warga adalah menolak kehadiran truk TNI dengan menutup jalan menggunakan pos kampling yang diangkat ke tengah jalan, papan kayu, serta drum. Konflik melebar ketika dalam penolakan ini, salah satu tokoh pemuda dan Camat Dewantara akan diinterogasi dan tempat interogasi tersebut adalah markas

³¹ Hasil wawancara penulis dengan anggota Taring Padi pada 9 September 2022 di Dusun Sembungan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

TNI. Warga menolak dan ikut bergerak ke markas TNI. Mobilitas massa dan TNI berhenti di persimpangan KKA. Bentrok pecah karena provokasi TNI yang melemparkan kayu kearah warga dan disambung dengan lemparan batu oleh warga kearah TNI. Setelahnya TNI merespon dengan tembakan lurus yang diarahkan ke warga selama 20 menit.³²

Meresponi peristiwa kekerasan sipil oleh TNI mendorong Taring Padi untuk membuat banner melalui Komnas Perempuan dengan merepresentasikan warga, terutama perempuan berbaris berjajar dan cukup banyak. Pada bagian kanan dan kiri banner digambarkan PMI yang sedang merawat korban.



Gambar 7. Banner “Pengungsi #1”

Banner ini memang tidak memiliki slogan tetapi dengan memahami wacana dibalik pembuatan banner maka dapat dipahami bahwa banner ini berbau penentangan publik terhadap militerisme. Krisis militer memang cukup banyak terjadi pada era Orde Baru, karena salah satu fungsi militer adalah menjaga ketertiban masyarakat, walau dalam praktiknya kerap bersinggungan dan penertiban ini dilakukan dengan represif. Setahun

³² Komnas HAM. “Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh”. Jakarta, 14 Juni 2016. h. 3-7.

setelahnya, Taring Padi juga tetap konsisten dengan protes militerisme mereka melalui penciptaan banner “Anti Militer”.³³ Protes kelompok terhadap militer yang digambarkan dengan mobilisasi masyarakat, meringsek militer dengan muka *celeng* dan seragam yang bertuliskan “Humanisme Universal”. Pada banner ini, militer juga digambarkan melakukan pelanggaran HAM dengan menembak masyarakat yang sedang membawa celurit dan bendera dengan bintang merah. Pada bagian belakang, terdapat ikon agama seperti masjid, bendera dengan lambang salib. Masyarakat juga digambarkan seperti akan menghadapi sesuatu hal baru setelah melewati militer. Penggambaran ini diperkuat dengan atribut yang dibawa oleh warga berupa sandang, pangan yang menggambarkan kesejahteraan hidup. Banner yang cukup menggambarkan rasa lelah, kecewa, muak masyarakat terhadap militer dan berusaha menyongsong hidup yang lebih sejahtera secara kolektif.



Gambar 8. Banner “Karnaval Anti Militerisme”

³³ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. “*Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu*”. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 110

3.2.4. Booklet

Media propaganda Taring Padi yang selanjutnya adalah booklet atau dikenal juga sebagai *zine*. media cetak yang menyerupai buku dengan mayoritas berisi grafis, cerita pendek, puisi, komik, maupun lagu yang dikerjakan oleh anggota Taring Padi maupun titipan dari pihak luar. Booklet Taring Padi dikenal dengan nama Terompet Rakyat dengan tujuan awal yaitu sebagai bentuk propaganda kelompok kepada masyarakat akar rumput secara langsung.³⁴



Gambar 9. Terompet Rakyat seri Februari 1999



Gambar 10. Terompet Rakyat seri Februari 1999

Produksi booklet dilakukan secara berkala setiap bulannya dan akan dibagikan secara gratis dan boleh diperbanyak. Untuk saat ini memang tidak terlalu banyak lagi booklet Terompet Rakyat yang bisa dilihat, terutama pada periode awal berdirinya kelompok dikarenakan pengarsipan yang kurang baik. Karya yang diliput dalam booklet ini seirama dengan kondisi sosial-politik pada masa itu.

³⁴ Arbuckle Heidi G. "Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia". Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 91.



Gambar 11. Terompet Rakyat seri Februari 1999



Gambar 12. Terompet Rakyat seri April 1999

Kembali lagi, karya Taring Padi memang mayoritas adalah hasil refleksi kelompok terhadap dinamika sosial-politik mereka. Dari beberapa booklet yang berhasil di arsipkan oleh Cemeti Art Foundation dan kemudian di hibahkan kepada IVAA (Indonesia Visual Art Archive), terlihat bagaimana baik anggota maupun rekan Taring Padi menyumbangkan buah pikir mereka baik dalam bentuk visual, sastra, maupun lainnya. Terompet Rakyat juga dinilai sebagai alat propaganda Taring Padi karena pada booklet ini terdapat ajakan untuk pekerja seni agar bergabung bersama Taring Padi dalam kerja transformatif mereka. Menanggapi suasana politik yang masih kurang stabil pada masa awal reformasi, serta cukup banyak permasalahan SARA yang terjadi, dengan memuat banyak karya yang menyuarakan hidup harmonis. Cukup banyak karya Taring Padi yang mengkomunikasikan perbedaan, dengan wacana mereka untuk tetap hidup rukun. Pemilihan tema sejalan dengan target Taring Padi yaitu masyarakat awam.



Gambar 13. Terompet Rakyat seri Mei 1999

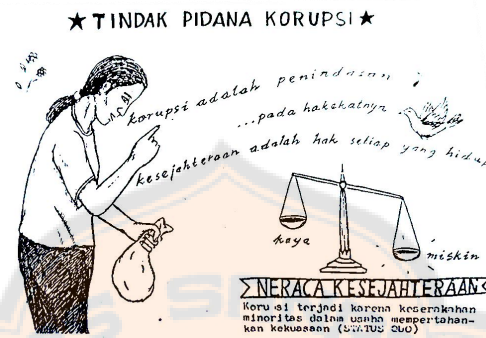


Gambar 14. Terompet Rakyat seri Mei 1999

Dalam beberapa kasus, bagian kosong booklet justru digunakan sebagai nota maupun catatan dagang. Tema humanisme yang dibawa Terompet Rakyat juga tidak jarang membahas tema kesetaraan gender. Terkadang penggambaran dari kesetaraan gender ini juga tidak dikomunikasikan secara gamblang, melainkan melalui permainan peran. Seperti ketika wanita menjadi tokoh utama dari cerita. Penggambaran wanita sebagai penjaga keadilan, ikut berjuang dalam bersuara, serta menjadi pengambil keputusan. Cara komunikasi ini mencerminkan bahwa pada masa tersebut, kesadaran akan pentingnya kesetaraan masih dirasa kurang, serta pandangan skeptis mengenai pembagian gender berdasarkan tugas sosialnya juga dirasa cukup stigmatif.



Gambar 15. Terompet Rakyat seri Mei 1999



Gambar 16. Terompet Rakyat seri Juni 1999

Dalam keadaan menjelang pemilu, booklet Taring Padi memuat cukup banyak tema mengenai kesadaran bersikap jujur, tidak terpengaruh, netral, serta mengkomunikasikan permasalahan aktual pada masa pra pemilu. Pada periode ini, wacana persatuan sebagai kekuatan masih menjadi wacana dominan Taring Padi. Hal tersebut sejalan dengan ideologi kelompok yang terinspirasi dari faham sosial. Hasil karya yang dimuat dalam booklet memang lebih mengutamakan narasi ketimbang berfokus pada visual saja. Strategi yang demikian dipilih karena disesuaikan dengan target pasar mereka yang mayoritas adalah warga biasa sehingga bentuk komunikasinya harus lebih gamblang dan terarah.

BAB IV

DAMPAK KETERLIBATAN TARING PADI DALAM SOSIAL-POLITIK INDONESIA 1999-2000

4.1 Politik

Politik kepentingan era Orde Baru mendorong perubahan pada sistem sosial-politik liberalisme¹. Secara konseptual memang tidak ada salahnya praktik ini dilakukan di Indonesia, terutama jika melihat denah perkembangan politik diakhir periode 1980-1999.² Kebebasan individu yang diagungkan oleh liberalisme mendorong sebuah praktik sosial-politik baru di Indonesia. Dalam dinamika sosial-politik, kapitalisme yang masuk dibarengi liberalisme menciptakan sebuah strata sosial baru, dimana politik praktik ditentukan oleh pemegang modal.³ Tercermin dari politik yang dibangun oleh Orde Baru melalui Presiden Soeharto dimana ekonomi merupakan tugas utama politik yang kemudian terepresentasi melalui politik pembangunan. Dalam kasus politik Orde Baru, faham liberal yang dibarengi dengan penanaman prinsip kapital, menghasilkan diskriminasi kelas.

Selanjutnya, refleksi sosial-politik ala Orde Baru juga dilakukan pada ranah seni, budaya Indonesia. Dominasi nilai kapital Orde Baru dalam dunia seni terlihat pada cara rezim memandang seni sebagai komoditas kapital atau sesuatu

¹ Konsep liberalisme gaya Orde Baru, diartikan sebagai cara pemerintah untuk mendorong masyarakat secara bebas dalam mengontrol ekonominya.

² Pemahaman ini diambil dari tesis Francis Fukuyama yang berjudul *"The End of History and The Last Man"*. Dalam tesis tersebut Fukuyama menjelaskan bagaimana ideologi demokrasi liberal memenangkan panggung ideologi politik dominan dunia, mengalahkan fasisme dan komunisme ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet di media akhir 1980 dan awal 1990.

³ Rajab Rudi. "Negara Orde Baru : Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh". *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 6, no 3, November 2004. h.184.

yang dinilai secara ekonomi.¹ Cara pandang seniman beralih dari bentuk perenungan terhadap situasi aktual (seni interpretatif) menjadi seni yang memerlukan wacana dan persona untuk menghargainya (seni kontemporer), atau seni individualis.² Pada periode tahun 1980-an, seni dilembagakan dibawah Departemen Penerangan yang melakukan sunting terhadap seni yang akan dipublikasi oleh seniman, imbasnya adalah menurunnya sikap kritis seniman kepada lingkungannya.³ Hal ini berbeda jauh dari pembahasan seni menurut John Dewan yang dikutip oleh Bambang Sugianto. Pandangan tokoh tersebut menitik beratkan pada tanggung jawab seniman dalam berefleksi dan hidup seperti seni yang mereka ciptakan.⁴ Dengan artian, cara Orde Baru berpolitik akan mengganggu visi bawaan seorang seniman sebagai agen perubahan dan penciptaan ruang hidup ideal melalui karya mereka atau singkatnya seniman memiliki tanggung jawab moral dalam karya mereka.⁵

Melihat politik Indonesia pasca 1998 memang terjadi perubahan fundamental, seperti terjadinya perbaikan sistem politik kearah yang lebih

¹ Arbuckle Heidi G. *“Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia”*. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 22-23.

² Konsep berkesenian yang demikian didorong oleh modernisasi, terutama melalui negara Barat seperti Amerika dan Eropa. Konsep individualis tersebut tumbuh di Indonesia melalui pandangan Orde Baru dalam melihat seni sebagai aset. Penggambaran seni yang demikian, mendorong seniman untuk melepaskan dirinya dari aspek sosialnya, sehingga penciptaan karya hanya dilihat sebagai hasil pemikiran seniman dan terlepas dari realita lingkungannya.

³ Dalam diskusi yang diadakan oleh Art Jog pada 17 Agustus 2022 dan diisi oleh Yayak Yasmaka dan Gus Mus, menjelaskan kondisi seniman di era Orde Baru. Diskusi dengan tema “Sensor dan Budaya” menjelaskan dengan gamblang bagaimana Orde Baru berusaha menghentikan seniman yang memiliki semangat perubahan, terutama seniman yang vocal terhadap kondisi sosial pada masa Orde Baru.

⁴ Sugiharto Bambang. *“Untuk Apa Seni ?”*. Bandung. Matahari .2013. h. 31.

⁵ Dalam tulisannya, Bambang Sugiharto juga menjelaskan bagaimana korelasi pandangan John Dewey dalam merefleksikan seni dengan kehidupan seniman sehari-hari. Menurutnya, seni itu berkaitan dengan pengalaman hidup sehari-hari seniman. Pengalaman intens tersebut kemudian menciptakan reaksi emosional tertentu. Contoh kasusnya adalah kelompok Dada, yang tumbuh dalam kondisi seni tinggi yang dinilainya tidak relevan dengan kondisi *chaos* pada Perang Dunia Pertama. Sehingga Dada menciptakan sebuah alternatif lain dimana seni dikorelasikan dengan pengalaman spiritual seniman dan menghasilkan bentuk seni yang baru, dimana seni ini beresonansi dengan kondisi sosial.

demokratis. Perubahan secara praktis memang mengarah ke arah yang lebih baik, seperti penyesuaian masa jabatan presiden, mendorong munculnya stabilitas nasional (kasus Timor Timur), pemberesan eksekutif pemerintah yang berfokus pada penghapusan KKN melalui badan pemerintahan independent seperti KPK, dll. Memang, jika dilihat sekilas sepertinya perubahan sudah terjadi dan mengarah ke arah positif, tetapi dalam kasus sosial-politik belum terjadi perubahan yang diharapkan. Kondisi sosial-politik pasca reformasi masih berada pada tahap transisi, dimana konflik masih terjadi dan ketegangan antar kelompok masih berlangsung.⁶ Politik kepentingan masih menduduki porsi dalam pemerintahan Indonesia di masa transisi ini. Hal tersebut berbanding terbalik dengan harapan Taring Padi dalam tuntutan mereka untuk mengembalikan demokrasi kerakyatan.⁷ Budaya politik Indonesia yang berfokus pada kelompok tertentu mendorong masyarakat untuk merefleksikan kembali posisi demokrasi di Indonesia. Taring Padi melalui kerja seni dan aktivisme, mereka berusaha melakukan perubahan secara politik.

Peran Taring Padi dalam perpolitikan Indonesia dijabarkan kedalam tiga pokok mukadimah kelompok. Pertama,

Taring Padi hadir sebagai wadah bersama bagi pekerja seni dalam mendorong pengembangan seni dan budaya lokal dengan orientasi kerakyatan yang digali dari kebutuhan rakyat serta pertumbuhan pribadi, demokrasi kerakyatan dan tidak materialistis. Keadilan sosial serta keteraturan hidup atau kehidupan masyarakat yang diharapkan oleh Taring Padi didasarkan pada budaya lokal dan bertumbuh tanpa melupakan budaya lokal.⁸

⁶ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. *“Taring Padi : Seni Membongkar Tirani”*. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 89.

⁷ Adin, Ajeng Nurul Aini, dkk. *“Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolektif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir”*. Jakarta. Yayasan Gudskul Studio Kolektif. 2021. h. 22-23.

⁸ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. *“Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”*. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 69

Pokok ini dapat dilihat dari kerja aktivisme Taring Padi pada peristiwa “*memedi sawah*” yang dilakukan pada Desember 1999. Kegiatan yang bekerja sama dengan LSM Kelompok Peduli Lingkungan (Keliling) dan Karang Taruna Krida Muda Wahana Desa Kranggan menunjukkan kerja aktivisme Taring Padi didasarkan pada lokalitas dan pembangunan masyarakat.⁹ Kegiatan yang berawal dari protes terhadap penggunaan pestisida kimia serta imbas buruknya terhadap tanah yang kemudian, diteruskan pada praktik aktivisme langsung dengan memakai media orang-orangan sawah sebagai bentuk nilai lokalitas.¹⁰ Pada peristiwa ini, dapat dilihat dengan jelas bagaimana Taring Padi menunjukkan keberpihakannya serta dengan sadar melakukan *recall* budaya untuk melawan budaya modern yang ternyata berdampak buruk terhadap masyarakat akar rumput.

Dampak yang diberikan oleh praktik aktivisme ini adalah mendorong pemakaian pestisida organik dan orang-orangan sawah yang juga merupakan budaya lokal.¹¹ Kecenderungan politik Taring Padi juga terlihat dari bagaimana kelompok mengkomunikasikan permasalahan masyarakat akar rumput dengan organisasi terkait serta memiliki tujuan yang lebih besar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui organisasi terkait.¹² Dalam proses ini, terlihat dengan jelas bagaimana haluan politik kelompok. Mengutip kembali kalimat yang sering dikutip oleh Bung Hatta “*a world where everybody should be happy*”, dengan jelas terlihat usaha Taring Padi dalam menciptakan kehidupan yang

⁹ Arbuckle Heidi G. “*Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia*”. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 118-119

¹⁰ Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. “*Taring Padi : Seni Membongkar Tirani*”. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011. h. 142

¹¹ Arbuckle Heidi G. “*Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia*”. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019. h. 119

¹² Selain melakukan kerja aktivisme secara mandiri, Taring Padi juga menjadikan diri mereka sebagai jembatan antara organisasi dengan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya sebuah ekosistem saling dukung antar masyarakat.

bahagia dan aman bagi masyarakat akar rumput. Dalam kasus “*memedi sawah*” Taring Padi mengkomunikasikan budaya lokal dalam melawan hama, sebuah cara tradisional yang dinilai cukup efektif dan tidak berimbas buruk terhadap lingkungan. Selain itu dengan merangkul LSM keliling, Taring Padi menciptakan sebuah relasi sosial yang saling bergantung dan memberikan akses hubungan mutualisme antara rakyat dengan LSM keliling.¹³

Point selanjutnya mengungkapkan tujuan dari pembentukan Taring Padi terlihat dari point kedua mukadimah kelompok.

Sebagai wadah bersama pekerja seni untuk memainkan peran yang optimal dalam mendorong perubahan dengan, 1) mengembangkan potensi seni yang ada untuk perubahan dengan menyajikan solusi atas persoalan, kebutuhan, keinginan rakyat pada karya yang dihasilkan. 2) mendekonstruksi simbol-simbol hegemoni negara yang melemahkan kemampuan rakyat dalam mengontrol kebijakan pengembangan seni dan budaya. 3) mendesakkan perubahan atas pemahaman seni, untuk bisa membuka terselesaikannya keinginan, kebutuhan serta cita-cita rakyat atas segala hal.¹⁴

Tiga point diatas menjelaskan fokus kerja Taring Padi secara politis didedikasikan pada kerja seni budaya kerakyatan. Sebuah kerja yang tidak hanya berfokus pada mediasi konflik antar kelas melalui kerja seni, tetapi juga secara langsung bergerak kepada kantong masyarakat untuk menciptakan ruang alternatif.¹⁵ Pembahasan masalah hegemoni, menempatkan Taring Padi sebagai oposisi dari politik praktis dominan. Budaya politik borjuis yang mendeskriditkan masyarakat akar rumput, dihadapi dengan penciptaan ruang alternatif bagi masyarakat akar rumput untuk berdinamika melalui pendekatan aktivisme oleh kelompok dengan

¹³ *Loc. cit*

¹⁴ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. “*Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu*”. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 69

¹⁵ Adin, Ajeng Nurul Aini, dkk. “*Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolketif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir*”. Jakarta. Yayasan Gudskul Studio Kolektif. 2021. h. 24

dasar demokrasi proletar.¹⁶ Konsep demikian terlihat dari cara kelompok dalam menginisiasikan kerja aktivisme mereka melalui kerja advokasi terhadap permasalahan masyarakat.¹⁷

Point pertama berbicara mengenai pemanfaatan seni dalam menyajikan solusi yang terlihat dari penggunaan slogan dan lokalitas dalam kerja seni mereka. Slogan digunakan untuk mengkomunikasikan solusi dan permasalahan aktual. Meminjam konsep komunikasi Ben Anderson melalui media komik, Taring Padi dalam menghadapi keadaan politik dominan Orde Baru menggunakan cara yang sama, yaitu seni satiris. Dengan berfokus pada mengembangkan suatu kesadaran kolektif terhadap realitas yang ingin disampaikan.¹⁸ Seperti yang tertulis pada karya poster maupun banner Taring Padi, slogan seperti “senjata bukanlah solusi”, “tolak militerisme”, “buruh bersatu tak bisa dikalahkan”, “jalin perdamaian”, “berikan cinta pada sesama”, dll menunjukkan, dalam merefleksikan kondisi sosial politik Taring Padi menggunakan seni sebagai bentuk komunikasi politik mereka. Dalam hal ini, memang tidak serta merta penggunaan slogan permasalahan akan terselesaikan dengan segera, tetapi terdapat kemungkinan untuk adanya dialog antar kelompok dalam merefleksikan kondisi aktual dengan slogan Taring Padi sehingga memunculkan solusi alternatif penyelesaian dalam permasalahan.

Fokus kelompok dalam mengkritik serta mengedukasi masyarakat melalui seni dapat direfleksikan pada point selanjutnya, dimana kelompok berfokus untuk mendekonstruksi simbol-simbol hegemoni negara yang meredefinisi nilai rakyat.

¹⁶ *Ibid.* h. 123

¹⁷ *Ibid.* h. 25

¹⁸ Anderson, Benedict R.O.G. “*Kuasa Kata : Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia*”. Yogyakarta. Mata Bangsa. h. 333-339.

Nilai kapitalis telah mendominasi sistem sosial politik Indonesia dalam waktu lama pada masa Orde Baru, melalui penciptaan budaya borjuis seperti kontrol budaya, redefinisi rakyat sebagai *homoeconomicus* (manusia ekonomi) sehingga menciptakan kelompok rakyat yang pasif terhadap urusan politik dan kelompok yang mudah dikontrol.¹⁹ Menanggapi kondisi tersebut, Taring Padi melalui kerja aktivismenya, berusaha tetap melakukan protes atau meningkatkan kesadaran publik terhadap dominasi kapital dalam politik Indonesia yang terlihat dari keikutsertaan Taring Padi dalam penolakan IMF pada Maret 2000 di Jakarta, dengan tema “koalisi anti utang”.²⁰ Penolakan yang didasarkan pada kekhawatiran terhadap dominasi kapital di Indonesia. Kekhawatiran selanjutnya adalah IMF akan mengintervensi politik Indonesia dengan alasan pemulihan ekonomi.²¹

Point ketiga dalam fokus kedua dari mukadimah Taring Padi memang berfokus pada masalah internal dunia seni rupa. Gaya politik Taring Padi selain bergerak keluar dalam meredefinisi nilai rakyat, juga berusaha meredefinisi nilai seni dari dalam. Pengaruh yang dihadirkan melalui kerja aktivisme dan seni Taring Padi menjadi salah satu bentuknya. Kerjasama mereka dengan organisasi lain pun juga menyumbangkan pandangan budaya kerakyatan kepada kelompok seni yang sering dinilai eksklusif, terutama di daerah Jawa Barat (Bandung dan Jakarta). Dinamika ini dapat dilihat melalui jurnal Karbon yang ditulis oleh yayasan Gudskul yang menampung opini Taring Padi dan Apotek Komik sebagai

¹⁹ Konsep redefinisi masyarakat menjadi *homoeconomicus* direpresentasikan oleh Orde Baru melalui pemilihan fokus mereka dalam berpolitik yang menempatkan ekonomi sebagai panglima. Selanjutnya, pemerintah mengontrol masyarakat melalui dinamika ekonomi, atau dikenal juga dengan neo-kolonialisme dimana pemegang modal menjadi penentu kehidupan di suatu masyarakat. Sehingga memunculkan kelompok elit superior dan mendeskreditkan kehidupan masyarakat, terutama kelompok akar rumput dan berujung pada ketimpangan kelas.

²⁰ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. “Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 110

²¹ Tarmidi, Lepi T. “Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perubahan, FEUI, Maret 1999

organisasi seni kerakyatan yang memiliki haluan berbeda. Dinamika kedua kelompok ini memang memiliki fokus yang cukup berbeda tetapi masih bergerak dalam satu konteks yang sama, yaitu masyarakat marginal atau kelompok sosial minor.²² Melalui dinamika kedua kelompok ini memang dunia seni secara internal melakukan ekspansi kearah baru dimana kerja seni tidak lagi berfokus pada penciptaan karya reflektif saja, melainkan berkembang pada bentuk kerja aktivisme lainnya dengan fokus kepada masyarakat sebagai variabel pentingnya.²³

Fokus teraktir dari mukadimah Taring Padi yang menunjukkan haluan politik mereka adalah

Menjadikan Taring Padi sebagai wadah bersama bagi pekerja seni dalam komunikasi, tukar pengalaman, dan informasi serta memperkuat jaringan kerja sama sesama lembaga yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Taring Padi.²⁴

Fokus terakhir ini dalam hubungannya dengan kelompok memiliki keterkaitan untuk membangun jaringan kerja yang memiliki dampak terhadap kehidupan sosial. Cara ini digunakan sebagai satu bentuk kesadaran kelompok dalam melawan dominasi politik elit. Taring Padi merupakan sebuah organisasi yang bertumbuh secara organik, dengan artian sebuah peristiwa yang diciptakan Taring Padi memiliki dampak domino dalam menciptakan organisasi baru dengan kesamaan visi dan misi kerakyatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui kerja sama antar organisasi yang kemudian bertumbuh memperlebar jejaring kerja kepada kesempatan baru. Dalam perkembangan selanjutnya, Taring Padi tidak hanya berfokus pada kerja seni dan aktivisme eksklusif mereka saja, tetapi juga

²² Adin, Ajeng Nurul Aini, dkk. *“Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolketif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir”*. Jakarta. Yayasan Gudskul Studio Kolektif. 2021. h. 113

²³ *Ibid.* h. 119

²⁴ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. *“Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”*. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 69

melakukan dinamika sosial dengan masyarakat dan organisasi lain untuk membangun sebuah keterikatan sosio-emosional, yang berperan sebagai tenaga pendorong kelompok untuk menciptakan ruang-ruang alternatif baru.²⁵

Dinamika politik Taring Padi sebagai bentuk refleksi terhadap politik Indonesia yang carut marut pada tahun-tahun transisi, memberikan sebuah perspektif terhadap dinamika kerakyatan yang dipicu oleh konflik struktural. Melalui kerja seni dan aktivismenya, Taring Padi memperlihatkan sudut pandang mereka terhadap bentuk ideal masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial.

4.2 Sosial

Pandangan Orde Baru dalam menempatkan ekonomi sebagai panglima, secara jelas menunjukkan sikap negara untuk menyingkirkan permasalahan publik dari pembahasan politik. Politik Orde Baru memang menunjukkan kecenderungan dalam menciptakan pemerintahan kapitalis yang otoriter.²⁶ Kecenderungan tersebut mendorong pengabaian pemerintah pusat dalam menciptakan keteraturan sosial atau stabilitas hidup sosial. Fokus politik negara adalah penciptaan negara ekonomi yang menggunakan kestabilan politik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga, sedari awal tujuan politik Indonesia pada masa Orde Baru adalah kestabilan ekonomi yang didukung oleh kestabilan politik. Selanjutnya, peran rakyat dalam konteks politik yang demikian adalah sebagai variabel untuk menjalankan roda ekonomi. Redefinisi tersebut dinilai semakin menjauhkan negara dari konsep demokrasi. Konsep politik Orde Baru memang menunjukkan adanya kecenderungan untuk menciptakan kapitalis otoritarian melalui

²⁵ Adin, Ajeng Nurul Aini, dkk. *"Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolketif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir"*. Jakarta. Yayasan Gudskul Studio Kolektif. 2021. h. 154-155

²⁶ Rajab Budi. "Negara Orde Baru : Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik Yang Rapuh". *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 3, Nov 2004. h. 185.

keikutsertaan militer dan pemegang modal dalam urusan politik praktis serta, represi terhadap rakyat.²⁷ Rakyat dalam variabel politik Orde Baru hanya dilihat berdasarkan fungsi ekonominya, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan tulen dalam menjalankan kehidupan sosial.

Selain didasarkan pada realita redefinisi rakyat, Taring Padi juga berfokus pada pengembalian budaya kerakyatan sebagai cara hidup masyarakat akar rumput. Pendekatan yang dilakukan melalui kerja konservatif yang dibungkus dengan pendekatan seni dan aktivisme. Mengingat kembali realita kekalahan masyarakat terhadap politik dominan terlihat dari pengurangan ruang hidup masyarakat oleh pemerintah. Pada periode menjelang akhir masa pemerintahan Orde Baru, pengurangan ruang hidup dapat dilihat dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif dan pada peristiwa tersebut, pemerintah justru berpihak pada pemegang modal yang terlihat dari sikap represif aparat.²⁸ Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memandang masyarakatnya serta melakukan pelanggaran kepada hak-hak dasar manusia, seperti hak memperoleh keadilan, rasas aman, dan kesejahteraan.²⁹ Rentetan peristiwa serta orientasi politik Orde Baru mengharuskan masyarakat untuk secara mandiri bertahan hidup.

Selain buruh, petani juga menjadi salah satu kelompok masyarakat yang menerima dampak dominasi politik Orde Baru. Pembangunan yang difokuskan pada sektor industri, telah menggosur lahan pertanian dan selanjutnya berimbas

²⁷ *Ibid.* h. 186.

²⁸ Kwik Kian Gie. *“Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik”*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1999. h. 38.

²⁹ <https://prisma.kemenkumham.go.id/jenis-jenis-ham#:~:text=Hak%2Dhak%20tersebut%20antara%20lain,hak%20anak%20dan%20hak%20wanita>. diakses pada 29 Mei 2023, pukul 9.26 WIB.

pada ketidakmampuan petani untuk bertahan.³⁰ Selain melakukan kerja advokasi melalui festival “memedi sawah”, Taring Padi juga mengikuti kegiatan seperti Forum Kebudayaan Rakyat Yogyakarta (FKRY) dengan tema “Kebudayaan Rakyat Tertindas” di DPRD Provinsi DIY.³¹ Forum ini selain mengumpulkan aktivis dan pelaku budaya dalam panggung budaya, juga dipakai sebagai ajang tukar pikiran dalam membicarakan permasalahan rakyat aktual serta kemungkinan penyelesaiannya.³²

Pemahaman yang demikian mendorong realitas bahwa rakyat tidak dilihat lagi berdasarkan fungsi sosialnya. Urgensi untuk menjaga keteraturan sosial bagi Orde Baru, dinilai hanya sebatas untuk mengamankan laju produksi, sehingga keteraturan sosial bukan menjadi fokus pemerintah, terlebih dalam menciptakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Fakta tersebut mendorong munculnya gerakan sosial dalam menciptakan ruang alternatif untuk hidup. Taring Padi sebagai salah satu organisasi yang mengatas namakan rakyat dalam kerja mereka, juga berusaha menciptakan ruang alternatif bagi masyarakat akar rumput. Kerja penciptaan tersebut tergambar dari hubungan yang dibangun oleh Taring Padi dengan kelompok sosial yang menjadi fokus kerja mereka. Fokus Taring Padi juga tergambar dari tujuan kelompok untuk menciptakan perubahan sosial pada masyarakat akar rumput. Pada periode awal berdirinya Taring Padi, fokus kelompok memang masih tertuju pada penyampaian protes terhadap realita hidup dan kerja advokasi kelompok yang bertujuan untuk melakukan kerja transformasi. Dampak sosial yang dibangun oleh Taring Padi pada awal berdirinya adalah

³⁰ _____. “Menembus Batas Damai untuk Semesta : Wawancara oleh David Barsamian dan Liem siok Lan”. Semarang. PT Aneka Ilmu. 2009. hlm 215

³¹ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. “Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 110

³² Diskusi Tata Kelola Fest #4 pada 10 Oktober 2022 bersama Ladija Triana Dewi.

dengan menyebarkan kesadaran kepada organisasi lain untuk secara sadar bersama-sama menciptakan ruang alternatif. Peningkatan kesadaran tersebut terlihat dari kerja bersama yang dilakukan oleh Taring Padi dengan organisasi berbasis sosial lainnya. Seperti kerja sama yang dilakukan kelompok dengan Serikat Pengamen Indonesia, Kelompok Rakyat Biasa (KRB) Tangerang, Jaringan Kerja Budaya, Lembaga Penerbitan, Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa Jakarta, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, dll.³³ Fokus kerja organisasi yang dilakukan oleh Taring Padi masih berfokus pada peningkatan kerja bersama yang juga menyebarkan fokus kerja Taring Padi kepada publik. Strategi yang dipilih merupakan cara Taring Padi untuk memiliki jaringan nasional maupun internasional dalam upaya mereka untuk menggabungkan kesadaran mayoritas terhadap realita sosial. Kerja internasional juga diikuti oleh Taring Padi melalui partisipasi karya yang dilakukan kelompok, seperti mengikuti pameran “Resistance Art” di Australia, “Art for Education” di Lithuania, dsb.³⁴ Fokus kerja internasional bertujuan untuk mengkomunikasikan realita sosial politik di Indonesia, terutama realita sosial masyarakat akar rumput. Selain digunakan sebagai penyebaran kesadaran, fokus kerja internasional Taring Padi adalah untuk menambah jejaring kerja kelompok secara internasional. Seperti yang dikatakan oleh Taring Padi ketika diwawancarai pada 5 September 2022.

Kerja Taring Padi dalam ruang sosial terlihat pada keterlibatan kelompok dalam mengkomunikasikan permasalahan. Pada periode awal berdirinya Taring Padi, keterlibatan kelompok dalam kerja sosial memang masih terbatas pada

³³ Witjaksono Bambang, Mohamad Yusuf, dkk. *“Taring Padi Bara Lapar Jadikan Palu”*. Yogyakarta. Galeri R.J. Katamsi. 2018. h. 106-112.

³⁴ *Loc Cit.*

pengkomunikasian karena memang hal tersebut adalah fokus kerja awal Taring Padi (membangun kesadaran kolektif). Dalam fokus kerja Taring Padi keterlibatan mereka dengan masyarakat dalam mengkomunikasikan permasalahan menjadi satu bentuk partisipasi mereka terhadap permasalahan sosial. Partisipasi kelompok dalam permasalahan masyarakat, mendorong munculnya solusi alternatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Dalam menghadapi permasalahan konflik, selain kelompok menyuarakan permasalahan keluar melalui karya partisipatoris masyarakat, juga memberikan alternatif penyelesaian masalah. Dalam prosesnya, selain bertujuan untuk menyuarakan permasalahan dan memberikan alternatif penyelesaian, Taring Padi juga berusaha membangun ikatan sosio-emosional antara kelompok (perupa) dengan masyarakat (subyek karya) sehingga selain mendapatkan inspirasi dalam berkarya, Taring Padi juga melakukan kerja transformatif dan memperluas jaringan organisasi kepada masyarakat akar rumput. Dalam perkembangannya, kerja partisipatoris tersebut tidak hanya berhenti pada peristiwa “memedi sawah”, tetapi juga menjadi haluan kerja Taring Padi. Bentuk pemikiran tersebut muncul atas kesadaran kelompok untuk lebih berfokus pada masyarakat sebagai variabel yang “dikalahkan oleh politik” daripada berfokus pada transformasi politik seperti yang dilakukan pada awal berdirinya kelompok. Keterlibatan Taring Padi dengan masyarakat merupakan sebuah bentuk pembelajaran kelompok terhadap kondisi sosio-politik masyarakat bersangkutan. Dalam kasus ini, Taring Padi tidak hanya mengadvokasi permasalahan tetapi juga melihat sudut pandang masyarakat lokal dalam menyelesaikan permasalahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dinamika politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan sebuah puncak dari dinamika sosial-politik yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ketidakstabilan politik, kekacauan sosial, permasalahan sosial, dan “bencana” ekonomi menandakan akhir dari kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai kepala Orde Baru. Permasalahan ekonomi yang tidak ditangani dengan baik merembet ke permasalahan lain, terutama sosial. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, masyarakat sebagai kelompok sosial mulai berkumpul secara kolektif sebagai respon untuk tetap bertahan. Respon yang muncul tersebut disebabkan oleh pemerintah yang lebih berfokus pada permasalahan ekonomi “pembangunan” ketimbang urusan sosial. Dalam dinamika tersebut, Taring Padi terbentuk dengan berlandaskan pada semangat mereka untuk mengembalikan posisi rakyat dalam panggung demokrasi.

Keterlibatan Taring Padi dalam dinamika sosial-politik Indonesia terlihat pada kerja aktivisme mereka. Keberpihakannya pada masyarakat akar rumput mendorong mereka untuk mengkonsolidasi permasalahan masyarakat yang merupakan imbas dari sifat otoriter pemerintah Orde Baru. Permasalahan seperti tindakan represif, sikap otoriter aparat, serta penangkapan aktivis menunjukkan sikap pemerintah yang anti kritik. Permasalahan tersebutlah yang berusaha dibawa Taring Padi kepada panggung yang lebih luas. Melalui pendekatan seni, kelompok mengharapkan untuk munculnya kesadaran akan kondisi sosial-politik. Tujuan Taring Padi dalam melaksanakan kerja aktivisme ini adalah untuk memberikan

siasat hidup alternatif hidup bagi masyarakat akar rumput. Dalam posisi politik Orde Baru, masyarakat memang hanya dianggap sebagai variabel ekonomi sehingga, kesejahteraan mereka tidak terlalu dipedulikan. Penyampaian permasalahan dan kritik melalui seni menjadi bahasa politik Taring Padi kepada masyarakat. Melalui medium banner, poster, wayang kardus, booklet, dsb, memberikan Taring Padi cukup banyak opsi dalam mengusahakan adanya perubahan dalam masyarakat. Bahasa politik yang diambil Taring Padi tidak hanya bertujuan untuk merubah kondisi masyarakat saja, namun juga digunakan untuk memberikan “sindiran” kepada kalangan elit. Dengan garis akhir yaitu munculnya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kerja aktivisme Taring Padi dalam perjalanan awalnya memang belum memberikan terlalu banyak dampak. Pada periode awal ini, Taring Padi lebih berfokus untuk menyebarkan kesadaran dan membangun jejaring yang mereka gunakan untuk menyuburkan kerja aktivisme kepada masyarakat. Secara politis, kerja aktivisme dan seni Taring Padi belum menunjukkan hasil yang diinginkan kelompok. Karena adanya kesadaran bahwa musuh yang mereka lawan terlalu berat dan budaya politik yang dibangun sudah terlalu dalam. Kesadaran tersebut membuat Taring Padi untuk lebih berfokus membangun jejaring yang kemudian secara kolektif bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Kerja politik Taring Padi memang lebih dekat kepada kerja advokasi karena kecenderungan kelompok dalam mengkonsolidasi masalah melalui seni. Sedangkan kerja sosial Taring Padi, lebih dekat dengan kerja aktivisme. Hal tersebut didorong oleh tujuan Taring Padi untuk melakukan transformasi. Fokus kerja aktivisme Taring Padi terletak pada terlibatnya kelompok, organisasi lain, dalam kerja partisipatoris kelompok dalam

dinamika sosial masyarakat, dengan tujuan untuk melakukan perubahan kepada masyarakat. Melibatkannya organisasi lain memberikan opsi kepada Taring Padi dan masyarakat untuk menjadi salah satu jalan keluar alternatif mereka. Tergambar dalam festival yang diinisiasi oleh Taring Padi “*memedi sawah*” yang dilakukan di Dusun Wedi, dengan menggandeng keliling, kelompok memberikan alternatif hidup petani organik yang sudah mulai digusur oleh pupuk kimia melalui program PELITA.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan saran, sebagai berikut:

- a. Dalam pembelajaran Sejarah Indonesia, pembahasan mengenai reformasi masih berfokus pada topik politik dan ekonomi. Pembahasan mengenai dinamika sosial sebagai variabel sejarah kadang dikesampingkan. Penulis mengharapkan untuk munculnya pembahasan baru mengenai topik dinamika sosial, terutama dalam pembahasan peristiwa sejarah. Pemilihan topik Taring Padi sebagai subyek dalam melihat dinamika sosial-politik bisa menjadi pemicu bagi guru maupun pembaca untuk melihat mobilisasi sosial dalam peristiwa sejarah.
- b. Eksplorasi ide dalam menyampaikan materi mengenai gerakan sosial dengan fokus pada dinamika sosial-politik pada masa reformasi bisa menggunakan pendekatan artistik. Cara ini bisa lebih mudah dicerna oleh siswa, terlebih fokus Taring Padi dalam kerja aktivis mereka adalah dengan pendekatan seni. Karya Taring Padi bisa menjadi topik pembahasan menarik yang bisa dilakukan oleh guru kepada siswa.

Terutama karya yang dengan gamblang menyatakan protes kelompok terhadap kehidupan sosial-politik Indonesia pada masa reformasi.

- c. Skripsi ini dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa, baik dalam topik, jenis penelitian, dan pendekatan penelitian.
- d. Perlu ada penelitian lanjutan, terutama pada pembahasan kerja Taring Padi pasca reformasi. Mengingat kelompok yang masih melakukan kerja seni, dan aktivisme mereka hingga hari ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adin, Ajeng Nurul Aini, Aries Syarifuddin, dkk. 2021. *Mengeja Fixer 2021 : Pembacaan Kolektif Seni Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir*. Yayasan Gudskul Studi Kolektif. Jakarta.
- Anderson, Benedict R.O.G. 2000. *Kuasa Kata : Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia*. Yogyakarta. Mata Bangsa.
- Arbuckle Heidi G. 2019. *Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia*. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing.
- Contemporary Movements in European Painting*. The Toledo Museum of Art, Toledo, 1938
- Foulcher Keith. 2021. *Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni : Sejarah Lekra 1950 - 1965*. Pustaka Pias. Bandung.
- J.A Denny. 2020. *Demokratisasi Dari Bawah: Aksi-Aksi Unjuk Rasa dan Perubahan Rezim di Indonesia 1997-1998*. Jakarta. Cerah Budaya Indonesia.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya.
- Kwik Kian Gie. 1999. *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasisco Yongki Gigih. 2016. *Seni Nirmanusia: Seluk Estetika Postmodern Jean-Francois Lyotard*. Bantul. Ladang Kata.
- Rusfiana Yudi, Ismail Nurdin. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer Internasional dan Lokal Dengan Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya*. Bandung. Alfabeta cv.
- Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. 2011. *Taring Padi: Seni Membongkar Tirani*. Yogyakarta. Lumbung Press.
- Sugiharto Bambang. 2013. *Untuk Apa Seni ?*. Matahari. Bandung.
- Witjaksono Bambang, dkk. 2018. *Taring Padi, Bara Lapar Jadikan Palu*. Galeri RJ.Katamsi. Yogyakarta.

JURNAL

Astriyani Wndri, Haryo Rinardi. “Hubungan Letter of Intent (LOI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)”. *Volume 2, Historiografi, 2021,*

Darmawan Ade, Ugeng T. Moetidjo. Publik, Guna, dan Akalcara, Tidak Terkadang: Bertempatlah itu dalam Seni Rupa. *Vol 1, Jurnal Karbon, Keindahan Lawan Kesezamanan. 11/2000*

Dedi Agus. “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia”. *Volume 7, Jurnal Moderat, 2021*

Hendra Legowo Sivfian, Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996. *Volume 1, Publik Budaya, 2013*

Komnas HAM. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Simpang KKA Aceh. Jakarta, 14 Juni 2016.

Rajab Budi. Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. *Jurnal Sosiohumaniora, Vol 6, no 3, November 2004.*

Ramli Rizal. Ekonomi Indonesia 1998: Tahun Koreksi (a Year of Correction). *Volume 3, Jurnal Ketahanan Nasional, 1998.*

Suharko, gerakan sosial di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 10, No 1. Juli 2006*

Susilo Y. Sri, Budiono Sri Handoko. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektor industri: Pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan Indorani. *Volume 17, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2002.*

Tarmidi, Lepi T. Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perubahan, FEUI, Maret 1999.*

SUMBER LAIN

Kristian Ben Citto Laksana. “Pendidikan Demokrasi untuk Semua”. Pribadi. 2021.

Bexley Angie. Laporan Penelitian Lapangan. “History of the Radical Art Movement in the Transition of Authority in Indonesia (1930-2000)” (Canberra: Australia National University, 2000).

INTERNET

<https://nasional.tempo.co/read/1474929/kronologi-pembredelan-majalah-tempo-editor-dan-detik-27-tahun-silam> diakses pada 29 Oktober 2022. pukul 14.45 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/27/10170991/peristiwa-kudatuli-27-juli-1996-saat-megawati-melawan-tetapi-berakhir-diam> diakses pada 11 November 2022, pukul 10.45 WIB.

<https://historia.id/politik/articles/huru-hara-27-juli-1996-dalam-ingatan-wartawan-P4WmV> diakses pada 24 Maret 2023

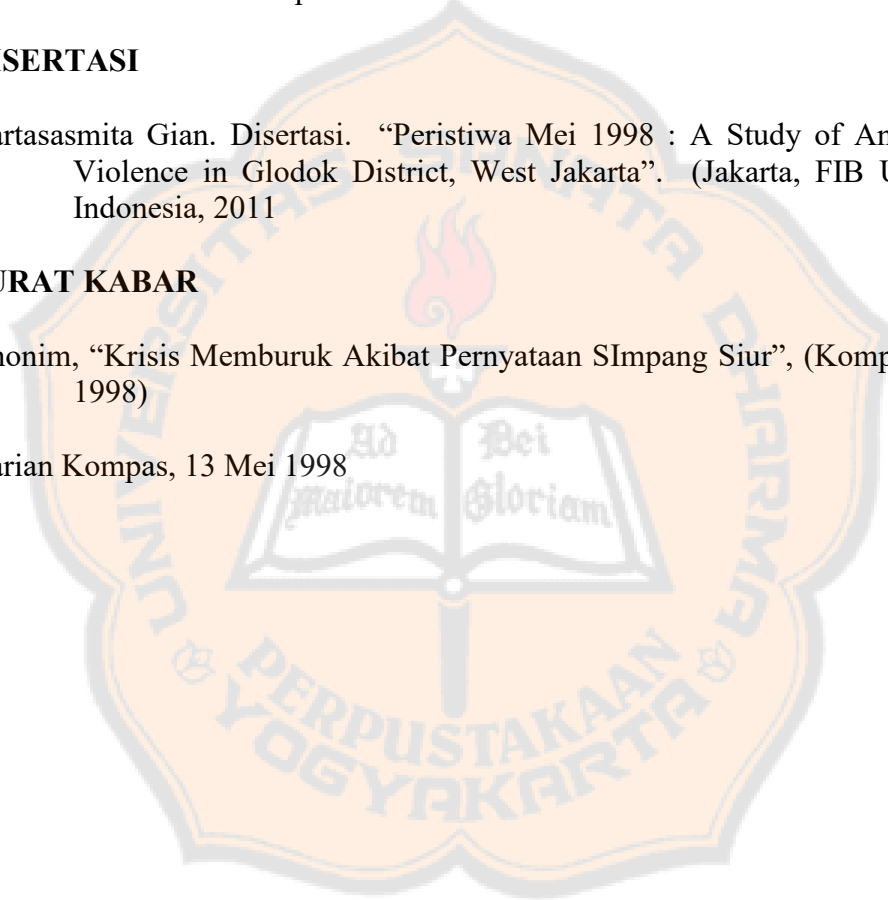
DISERTASI

Kartasmita Gian. Disertasi. “Peristiwa Mei 1998 : A Study of Anti-Chinese Violence in Glodok District, West Jakarta”. (Jakarta, FIB Universitas Indonesia, 2011)

SURAT KABAR

Anonim, “Krisis Memburuk Akibat Pernyataan SImpang Siur”, (Kompas, 3 Mei, 1998)

Harian Kompas, 13 Mei 1998





LAMPIRAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Sekolah	: SMA Negeri 11 Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas/Semester	: XII/II
Materi Pokok	: Kehidupan Bangsa Indonesia di Masa Orde Baru dan Reformasi
Alokasi Waktu	: 2 x 45 menit (1 kali pertemuan)

A. Kompetensi dasar dan Indikator :

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.7. Mengevaluasi peran pelajar, Mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia.	3.7.1. Mengidentifikasi tokoh-tokoh lokal yang terlibat dalam Reformasi. 3.7.2. Menganalisa peran tokoh masyarakat dalam Reformasi. 3.7.3. Menjelaskan hasil kerja tokoh masyarakat dalam Reformasi. 3.7.4 Merefleksikan nilai nasionalisme yang muncul dari dinamika sosial-politik pada masa reformasi.
4.6. Melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.	4.6.1. Menyusun laporan penelitian sederhana mengenai peran tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. 4.6.2. Mempresentasikan laporan dalam bentuk majalah sederhana.

B. Tujuan Pembelajaran

Dengan menggunakan pembelajaran *scientific learning*, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia, menjelaskan peran tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia, dan merefleksikan hasil kerja tokoh masyarakat dalam menjaga nasionalisme serta, menyusun laporan sederhana dan mempresentasikannya dalam bentuk majalah sederhana dengan rasa syukur, nasionalisme, dapat bekerja sama dan percaya diri.

s

C. Model dan Metode Pembelajaran

1. Model : *Project Base Learning*
2. Metode : Diskusi, presentasi

D. Materi pembelejaran

Memahami peran tokoh pelajar lokal dalam dinamika sosial-politik Indonesia pada masa reformasi.

E. Langkah-Langkah Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Guru dan peserta didik menyampaikan salam. • Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. • Guru memeriksa kehadiran siswa. • Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. • Guru menyampaikan topik tentang peran pelajar, Mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. 	15 Menit
Inti	<p>Kegiatan Literasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru menayangkan gambar yang berkaitan dengan materi Reformasi. • Guru memberikan pertanyaan pancingan kepada siswa sebagai landasan proyek. <p>Critical Thinking (Berpikir Kritis):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru mendorong peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambar yang ditayangkan. • Guru kembali menegaskan topik yang akan dibahas. • Guru memberikan pengantar singkat dengan memberikan pertanyaan untuk dipecahkan melalui diskusi kelompok. <p>Collaboration (Kerjasama):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dipersilakan untuk berkelompok secara mandiri dan melakukan riset sederhana mengenai tokoh masyarakat apa saja yang terlibat dalam reformasi. <p>Communication (Berkomunikasi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mempresentasikan hasil temuan mereka yang kemudian akan ditanggapi oleh peserta didik lain, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal menarik yang belum ditemukan dalam kerja mandiri sebelumnya. <p>Creativity (Kreativitas): Menyimpulkan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sebagai landasan siswa untuk mengerjakan <i>zine</i> (majalah) mereka.</p>	60 Menit

<p>Penutup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guru melakukan evaluasi menggunakan aplikasi Kahoot untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. • Guru merefleksikan nilai-nilai yang dapat diambil. • Guru memotivasi peserta didik. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan berikutnya. • Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa penutup 	<p>15 Menit</p>
----------------	--	---------------------

F. Penilaian

1. Penilaian Sikap : Penilaian Diri
2. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis
3. Penilaian Keterampilan : Pembuatan *zine* (majalah)

Yogyakarta, 16 Juni 2023

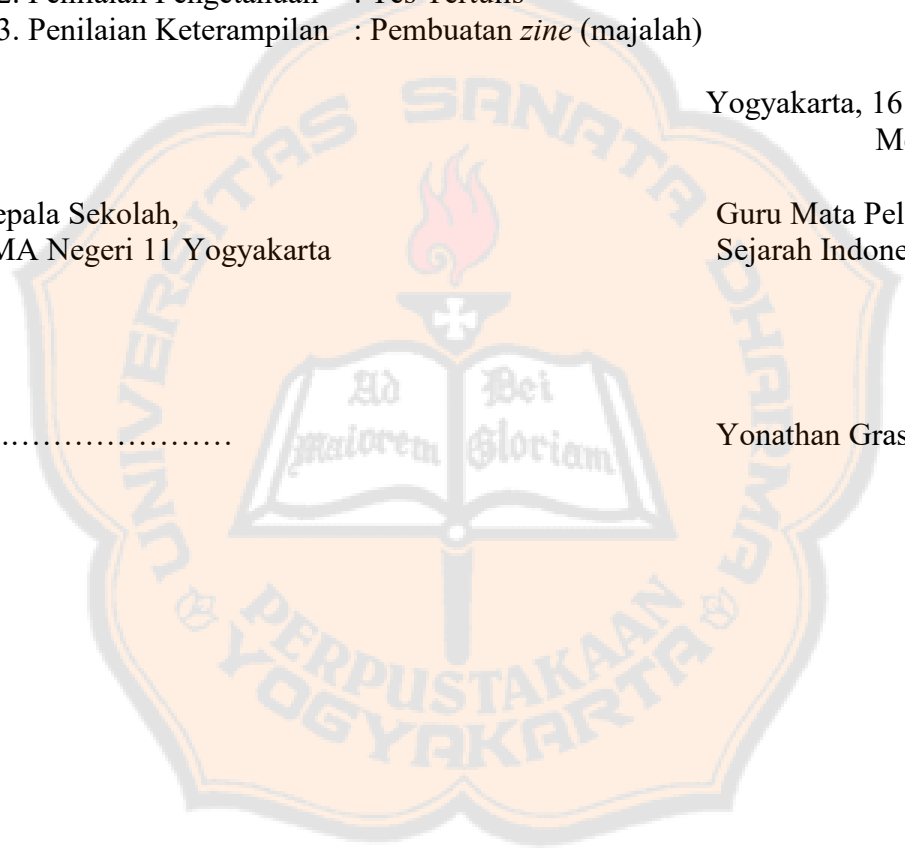
Mengetahui,

Kepala Sekolah,
SMA Negeri 11 Yogyakarta

Guru Mata Pelajaran
Sejarah Indonesia

.....

Yonathan Grasia T.P



Lampiran 1. Bahan Ajar Seni Reflektif Taring Padi

Reformasi merupakan sebuah peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, dimana pemerintahan otoriter Orde Baru tumbang dan digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Reformasi bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam, namun awal jejaknya sudah dimulai sejak awal 1990-an. Puncak peristiwa yang menjadi “gong” dari reformasi adalah terpilihnya kembali Soeharto pada pemilu 1997 dan krisis moneter yang menyerang Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1997. Penggambaran kehidupan masyarakat pada masa transisi cukup kompleks. Harga bahan pokok mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak jelas, dikarenakan pasar modal yang mengatur kurs Rupiah terhadap Dolar sedang mengalami ketidakpastian. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan agar tetap bisa bertahan atau mode “survival”. Dalam menghadapi kondisi yang demikian, masyarakat akar rumput mengalami dampak paling parah. Bagi kelas pekerja 1997-1998 merupakan masa yang cukup kelam, dikarenakan pada periode hampir satu tahun tersebut, banyak terjadi pemutusan kerja (PHK), kenaikan nilai barang pokok, dan berkurangnya pemasukan mereka.

Pada masa krisis moneter 1998, masyarakat akar rumput menjadi korban dari kinerja elit politik yang buruk. Dalam menghadapi kondisi sosial tersebut serta fakta bahwa elit tidak berpihak kepada rakyat, maka masyarakat secara kolektif, berkumpul untuk menyuarakan realitas mereka. Hal tersebut yang kemudian mendorong munculnya berbagai demonstrasi yang dilakukan hampir semua golongan mulai dari pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, maupun masyarakat biasa. Dinamika sosial-politik merupakan sebuah bentuk perlawanan atau resistensi untuk mendapatkan keadilan sosial. Dalam proses demonstrasi maupun perlawanan ini, banyak cara yang digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan kritik mereka, baik melalui demonstrasi langsung maupun dibungkus dengan pendekatan lain. Semangat kritik dan perubahan yang memuncak selama masa krisis moneter tersebut, terdapat satu kelompok yang menggunakan pendekatan artistik untuk menyampaikan protes mereka. Kelompok tersebut dibentuk pada 21 Desember 1998 dengan nama Taring Padi, sebuah kelompok yang berfokus dalam menyampaikan kondisi aktual masyarakat akar rumput dan mengembalikan posisi rakyat dalam panggung demokrasi.

Taring Padi dalam kerja seninya, melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tak langsung untuk menciptakan karya. Kerja seni mereka cenderung lebih bekerja dalam masyarakat secara langsung. Keterlibatan tersebut dapat dilihat ketika Taring Padi melibatkan masyarakat sebelum mengerjakan karya maupun aksi mereka. Selain masyarakat biasa, Taring Padi juga sering mengundang mahasiswa, kelompok masyarakat lain yang memiliki kesamaan visi dengan Taring Padi untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, Taring Padi dalam kerja seninya, justru lebih cenderung dekat dengan kerja aktivisme. Tergambar dari tujuan Taring Padi untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Kerja sosial yang dilakukan oleh Taring Padi menunjukkan bahwa kebersamaan merupakan sebuah cara alternatif untuk melawan ketidaknyamanan. Kehidupan sosial-politik yang tidak menentu pada tahun 1998-2000 tidak memberikan banyak opsi kepada masyarakat untuk hidup dengan baik. Kebersamaan yang diberikan oleh Taring Padi selain mengkomunikasikan permasalahan melalui karya, Taring Padi juga mencoba menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat melalui organisasi lain yang dirasa sesuai. Selain Taring Padi bekerja secara mandiri, mereka juga sering melakukan kolaborasi dalam kerja sosial mereka. Hasil akhir yang didapatkan melalui kerja Taring Padi, memang tidak langsung berkenaan dengan perubahan secara politik maupun sosial secara langsung. Tetapi melalui kerja yang dilakukan oleh Taring Padi mengingatkan masyarakat dari semua golongan untuk tetap sadar terhadap permasalahan yang masih terus berlanjut, meskipun dalam kondisi reformasi. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kerja Taring Padi tidak hanya sekedar protes saja, melainkan melalui perasaan ketidaksesuaian dan ketidaknyamanan, memberikan semangat kepada kelompok untuk tetap bekerja bagi masyarakat.

Lampiran 2. Media Pembelajaran

Media : Power Point

Sumber Belajar :

- Arbuckle Heidi G. *“Taring Padi Praktik Budaya Radikal di Indonesia”*. Yogyakarta. OCTOPUS Publishing. 2019.
- Sinaga Dolorosa, Kiswondo, dkk. *“Taring Padi : Seni Membongkar Tirani”*. Yogyakarta. Lumbung Press. 2011.

Lampiran 3. Lembar Penilaian Sikap

Indikator : Siswa dapat mengamalkan sikap syukur, nasionalisme, kerja sama dan percaya diri.

No	Nama	Sikap spiritual	Sikap sosial			Jumlah Skor
		Mensyukuri 1-4	Nasionalisme 1-4	Kerjasama 1-4	Harga diri 1-4	
1						
2						
3						
4						
5						

Keterangan :

a. Sikap Spiritual

Indikator sikap spiritual “mensyukuri”:

- Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran
- Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut
- Saling menghormati dan toleransi
- Memelihara hubungan baik dengan sesama teman sekelas

Rubik pemberian skor:

- 4= jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut
- 3= jika peserta didik melakukan 3 (tiga) kegiatan tersebut
- 2= jika peserta didik melakukan 2 (dua) kegiatan tersebut
- 1= jika peserta didik melakukan salah 1 (satu) kegiatan tersebut

b. Sikap Sosial

1. Sikap Jujur

Indikator sikap sosial “nasionalisme”:

- Bangga sebagai bangsa Indonesia
- Cinta tanah air dan bangsa
- Bangga pada budaya yang beragam
- Menghargai jasa para pahlawan

Rubik pemberian skor

- 4= jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut
- 3= jika peserta didik melakukan 3 (tiga) kegiatan tersebut
- 2= jika peserta didik melakukan 2 (dua) kegiatan tersebut
- 1= jika peserta didik melakukan salah 1 (satu) kegiatan tersebut

2. Sikap kerja sama

Indikator sikap sosial “kerja sama”

- Peduli kepada sesama

- Saling membantu dalam hal kebaikan
- Saling menghargai/toleran
- Ramah dengan sesama

Rubik pemberian skor

- 4= jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut
- 3= jika peserta didik melakukan 3 (tiga) kegiatan tersebut
- 2= jika peserta didik melakukan 2 (dua) kegiatan tersebut
- 1= jika peserta didik melakukan salah 1 (satu) kegiatan tersebut

3. Sikap harga diri

Indikator sikap sosial “harga diri”

- Tidak suka dengan dominasi asing
- Bersikap sopan untuk menegur bagi mereka yang mengejek
- Cinta produk negeri sendiri
- Menghargai dan menjaga karya-karya sekolah dan masyarakat sendiri.

Rubik pemberian skor

- 4= jika peserta didik melakukan 4 (empat) kegiatan tersebut
- 3= jika peserta didik melakukan 3 (tiga) kegiatan tersebut
- 2= jika peserta didik melakukan 2 (dua) kegiatan tersebut

1= jika peserta didik melakukan salah 1 (satu) kegiatan tersebut

Lampiran 4. Lembar Penilaian Pengetahuan

Essay

- 1) Kerjakan soal dibawah ini setelah melakukan diskusi bersama kelompok anda
- 2) Gunakan berbagai literasi yang bisa anda temukan (jurnal, internet, dan buku) serta cantumkan sumbernya.

Soal

1. Bagaimana proses terjadinya krisis moneter di Indonesia ?
2. Selama anda melakukan pencarian, tokoh pelajar, Mahasiswa, atau tokoh masyarakat siapa yang kalian temukan ? pilih salah satu.
3. Tantangan apa yang dialami oleh para tokoh, sehingga mereka merespon permasalahan sosial-politik 1998 dengan cara mereka ?
4. Dampak apa yang ditimbulkan oleh tokoh dalam menghadapi permasalahan sosio-politik reformasi ?
5. Nilai apa yang bisa kalian petik dari kerja sosial tokoh yang kalian pilih ?